

340.57
SYA
P en.

**PERUBAHAN PERANAN MAMAK DALAM PERKAWINAN
BAJAPUIK PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU
DI NAGARI SINTUAK KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

**Ridwan Syaukani SH.
B4B001183**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

AGUSTUS

2003

TESIS
PERUBAHAN PERANAN MAMAK DALAM PERKAWINAN
BAJAPUIK PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU
DI NAGARI SINTUAK KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Disusun oleh :

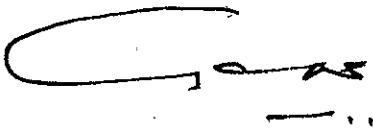
Ridwan Syaukani SH.
B4B001183

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 21 Agustus 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,
Pembimbing Utama


Sri Sudaryatmi, SH. Mhum.

Ketua Program Magister Kenotariatan


Prof. IGN. Sugangga, SH.

TIM PENGUJI

Prof. IGN. Sugganga, SH.

R. Suharto, SH. MHum.

Sri Sudaryatmi, SH. MHum.

Yunanto, SH. MHum.

Sukirno, SH. Msi.

Motto

Kok mandi di hilie- hilie

Kok mangecek di bawah- bawah

Tibo di kandang kambing mengembek

Tibo di kandang kabau menguak

Di mano langiek dijunjung

Di sinan bumi di pijak

Di situ rantiang di patah

Kalau mandi di hilir- hilir

Kalau bicara di bawah- bawah (bersahaja)

Tiba di kandang kambing mengembek

Tiba di kandang kerbau menguak

Di mana langil dijunjung

Di sana bumi dipijak

Di situ ranting dipatah

Nan kuriak iyolah kundi

Nan mereh iyolah sago

Nan baiak iyolah budi

Nan indah iyolah baso

Yang burik iyalah kundi

Yang merah iyalah sega

Yang baik adalah budi

Yang indah adalah basá- basi

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,

Ridwan Syaukani, SH

Abstrak

Perubahan peranan mamak dalam perkawinan bajapuik pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Ridwan Syauckani, SH, Tesis, Semarang; Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Hukum adat Minangkabau menganut sistem matrilineal yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Minangkabau yaitu dalam menentukan hubungan keluarga hanya hubungan diri dengan ibunya saja untuk seterusnya ke atas hanya melalui penghubung yang perempuan saja sampai pada perempuan yang dianggap sebagai asal dari mereka.

Akibat dari sistem ini maka setiap orang dalam masyarakat Minangkabau hanya ada satu klan dengan ibunya dan satu klan dengan keluarga ibunya. Bentuk perkawinan asli yang berlaku pada masyarakat Minangkabau adalah perkawinan semendo bertandang.

Suami hanya dianggap sebagai tamu yang datang menetap pada malam hari di rumah istrinya dan pagi harinya kembali ke rumah orang tuannya. Tapi sekarang adalah perkawinan menetap dan telah membentuk suatu keluarga inti (nuclear family) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

Dalam pada itu dikenal seorang laki-laki saudara kandung ibu yang disebut mamak. Ia sangat berpengaruh terutama dalam kehidupan kemenakan-kemenakannya, misalnya dalam mendidik dan mengasuh kemenakannya agar menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, seperti kata pepatah adat ; “anak di pangku kemenakan dibimbing urang kampung dipatenggangkan”.

Siayah dari anak tersebut pada hekekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anaknya karena menurut hukum adat Minangkabau mamaklah yang memegang peranan memimpin kemenakan-kemenakannya dalam satu paruik sampai satu Nagari.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitis serta melakukan wawancara langsung dilapangan.

Peranan mamak dalam memberikan uang jemputan buat kemenakannya sampai mencari jodoh. Namun dalam kenyataannya dewasa ini pada masyarakat Nagari Sintuak telah terjadi perkembangan peranan mamak di mana mamak sekarang tidak lagi memberikan uang jemputan buat kemenakannya dan tidak juga mencari jodoh. Yang memberikan uang jemputan sekarang adalah ayah karena ayah sudah punya tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya.

Peranan mamak terhadap kemenakan hanya dalam bidang yang menyangkut adat istiadat Minangkabau yang lainnya, seperti dalam hal pemberian gelar, memberi izin kawin, mengurus harta pusaka, menentukan tempat pemakaman jenazah anggota keluarga dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan diantara kemenakan-kemenakannya.

Abstract

The Change of Mamak's Role in Bajapuik Marriage of Minangkabau Ethnic law Society at Nagari Sintuak, Sintuak Toboh gadang, Padang Pariaman. Ridwan Syauckani, SH, Thesis, Semarang; Master of Notary Program, Diponegoro University.

Minangkabau's Ethnic law is adopting a matrilineal system that significantly influences Minangkabau society live, that is in determining the familial relation from mothers' line.

As the result of this every individual inside Minangkabau society has only one clan, that is his mother's clan, and his mother family's clan. The original marriage of Minangkabau society is Semendo Bertandang's Marriage.

Husband is only treated as a guest that stays only in the nighttime at his wife's house and comes to his family's home in the morning. Nowadays, the popular marriage is permanent marriage and nuclear family (Father, mother, and their children) has developed.

Mamak is recognized as mother's blood brother. He has many influences especially in his nephews' concerns such as teaching and taking care of their nephew so that in future they will be useful for the society. There was a said: "Children to be upheld, nephew to be guided, people to be respected".

Father of the son in Minangkabau is considered as having no authority upon his own son because according to Minangkabau's Law mamak handle the role in leading his nephews in the Nagari.

According to the formulated subject, therefore this study is qualitative in manner using descriptive analytic expression and direct interview on field.

The role of mamak is range from giving pickup money to their nephews to searching for their brides. But the reality today shows that there is a development in Mamak's role at Nagari Sintuak society where Mamak has no longer the role in giving pickup money or search for their brides. Pickup money is now being given by father due to the fact that father is the one who has the responsible upon his wife and children.

The role of Mamak toward his nephews is limited only in the part that related to Minangkabau tradition such as granting, marriage permission, taking care of inherited assets, determining burial site for any dead family member and solving dispute between his nephews.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena atau rahmat dan kurnia- Nya penulis dimampukan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini, yang berjudul : Perubahan peranan mamak dalam perkawinan bajapuik pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Sintuak Kecamatan Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tiada gading yang tak retak, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis sangat berterima kasih bila ada kritikan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat diselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi- tingginya kepada ibu Sri Sudaryatmi, SH. Mhum dan bapak Sukirno, SH. Msi selaku pembimbing, yang telah memberikan pengarahan, masukan- masukan dan kritikan- kritikan serta saran yang membangun selama proses penulisan tesis ini. Integritas beliau sebagai figur

ibu dan bapak yang selama ini dirasakan oleh penulis telah memberikan kesan yang berarti bagi penulis.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak- pihak yang mendukung proses penyelesaian studi dan penelitian ini antara lain :

1. Ketua dan Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara institusional telah mengizinkan dan memfasilitasi penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi.
2. Para guru besar dan staf pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara profesional dan arif telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Syahrial Datuk Maninjun selaku Wali Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian guna menyusun tesis.
4. Para informan yaitu ketua Lembaga Adat Nagari, para datuak, mamak rumah, dan seluruh masyarakat Nagari Sintuak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan data kepada penulis selama penelitian di lapangan dan pejabat pemerintah baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten.
5. Rekan- rekan angkatan 2001 yang selalu mendorong untuk menyelesaikan tesis ini dan setia membantu setiap pemasalahan yang penulis hadapi yang berkaitan dengan penulisan.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada ibunda Chasjiah dan ayahnda Syaukani (almarhum) semoga arwahnya di tempatkan di tempat yang layak di sisi- Nya serta kakak dan adik- adikku di kampung atas doa dan nasehat serta bantuan yang diberikan kepada penulis dan keluarga selama mengikuti pendidikan.

Pada akhirnya terima- kasih secara khusus penulis sampaikan pula kepada bapak Irsal Bakar, SH., sekeluarga yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Dengan tulisan ini pula penulis berharap dapat memberikan setitik manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang,

Ridwan Syaukani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Masyarakat Hukum Adat	14
A.1. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat	15
A.2. Garis Keturunan Masyarakat Hukum Adat	17
A.2.1. Garis Keturunan Parental	17
A.2.2. Garis Keturunan Patrilineal	18
A.2.3. Garis Keturunan Matrilineal	19
A.3. Struktur Masyarakat Hukum Adat Minangkabau	21

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	29
B.1. Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974	30
B.2. Perkawinan Menurut Hukum Islam	31
B.3. Perkawinan Menurut Hukum Adat	34
C. Kedudukan Mamak Dalam Hukum Adat Minangkabau	35
C.1. Pengertian Mamak Dalam Masyarakat Minangkabau	37
C.2. Hak dan Kewajiban Seorang Mamak	41
D. Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Minangkabau	47
D.1. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Minangkabau	52
D.2. Perkawinan Yang Ideal Bagi Orang Minangkabau	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	61
A. Metoda Pendekatan	62
B. Spesifikasi Penelitian	62
C. Sumber Data	62
D. Penentuan Populasi dan Sampel	64
D.1. Populasi	64
D.2. Sampel	64
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik Analisis	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil	67
A.1. Gambaran Umum Nagari Suntuak	67

A.1.1. Sejarah Pembentukan Nagari Sintuak	67
A.1.2. Letak Geografis	73
A.1.3. Demografi	74
A.1.4. Agama	74
A.1.5 Pendidikan	75
A.1.6. Mata Pencarian	77
A.2. Mamak Pada Masyarakat Nagari Sintuak	79
A.3. Kemenakan Pada Masyarakat Nagari Sintuak	82
A.4. Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Nagari Sintuak	83
B. Pembahasan	90
B.1. Perubahan Peranan Mamak Terhadap Kemenakannya	
Dalam Perkawinan Bajapuik.	90
B.2.Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Mamak	104
B.2.1. Ekonomi	104
B.2.2. Budaya Merantau Orang Minang	105
B.2.3. Pendidikan	107
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran- Saran	112
DARTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Sekolah Yang Ada Pada Nagari Sintuak	77
Tabel 2 Tanggung Jawab Mamak Rumah, Suku Koto Dalam Uang Jemputan	101
Tabel 3 Tanggung Jawab Mamak Rumah, Suku Sikumbang Dalam Uang Jemputan	101

DAFTAR ISTILAH MINANG

1. Anak Daro : Mempelai wanita
2. Alek : Pesta
3. Angku Palo : Wali Nagari
4. Awak Samo Awak : Kita sama kita
5. Bajapuik : Dijemput
6. Bagindo : Gelar bangsawan
7. Balumuik : Berlumut
8. Bajanjang Naik Batangga Turun : Bertangga naik bertangga turun
9. Bana : Benar
10. Bapandam : Berkuburan
11. Bakorong : Berkampung
12. Babalai : Berpasar
13. Batanggo : Bertangga
14. Barajo : Beraja
15. Baretong : Berhitung
16. Bapaneh : Berpanas
17. Baretong : Berhitung
18. Baralek Gadang : Pesta Besar
19. Cindawan : Cendawan

20. Dimano	: Dimana
21. Diagiah	: Diberi
22. Gaek	: Ibu dari nenek yang sama
23. Indak	: Tidak
24. Juadah	: Suatu pembawaan berupa nasi lengkap dengan lauk- pauknya beserta kue- kuenya
25. Kandak	: Keinginan
26. Korong	: Desa
27. Lakang	: Rusak
28. Lapuak	: Rapuh
29. Labuah	: Jalan Raya
30. Luhak	: Daerah (teritorial)
31. Manjapuik	: Menjemput
32. Mangato	: Mengatakan
33. Mamak	: Saudara laki- laki ibu
34. Marapulai	: Penganten laki- laki
35. Manjalang	: Berkunjungnya penganten wanita ke rumah mertua
36. Nasi Lamak	: Nasi enak
37. Niniak	: Nenek
38. Pa-i	: Pergi

39. Pasumandan	: Pengiring mempelai yang sudah menikah
40. Panungkek Penghulu	: Wakil penghulu
41. Penghulu	: Pucuk pimpinan dalam kaum
42. Pulang ka Bako	: Pulang ke mamak
43. Pulang Tampek Babarito	: Pulang tempat berberita (memberikan berita)
44. Rumah Gadang	: Rumah asli masyarakat Minangkabau
45. Sajurai	: Satu perut seorang nenek
46. Saparuik	: Bersaudara
47. Sakampung	: Satu kampung
48. Sasuku	: Satu Suku
49. Samande	: Satu ibu
50. Saluak	: Tutup kepala, sejenis peci kehormatan
51. Takambang	: Terkembang
52. Tagak Pondok	: Mendirikan pondok
53. Tungketan	: Tuntutan yang harus dipenuhi berdasarkan tingkatan seseorang dalam masyarakat
54. Turun Janjang	: Turun tangga.
55. Tunganai	: Saudara laki- laki tertua dari ibu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang satu sama yang lain mempunyai corak yang berbeda, seperti kata pepatah “lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”.

Keragaman Adat istiadat ini merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan dari leluhur bangsa yang memberikan aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam suatu kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakatnya.. Hal inilah yang kita sebut sebagai Adat Istiadat. Khusus pada masyarakat Minangkabau dikenal 4 (empat) macam pembagian adat, yaitu¹ :

1. Adat Nan Sabana Adat
2. Adat Nan Diadatkan
3. Adat Nan Teradat
4. Adat Istiadat

Adat Nan Sabana Adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat :

Nan tidak lakang dek paneh (tidak rusak karena panas)

Nan indak lapuak dek ujan (tidak akan lapuk karena hujan)

¹ Amir, MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Wijaya, Jakarta, 1999, hal. 73.

Paling- paling balumuik dek cindawan (paling- paling berlumut karena jamur atau cendawan).

Sedangkan Adat Nan Diadatkan adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat atau pun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari. Adat nan diadatkan dengan sendirinya hanya berlaku dalam satu nagari saja dan karenanya tidak boleh dipaksakan juga berlaku umum di nagari lain. Yang termasuk adat nan diadatkan ini, antara lain mengenai tatacara syarat serta upacara pengangkatan penghulu, tatacara, syarat serta upacara perkawinan yang berlaku dalam tiap – tiap nagari.²

Adat nan teradat adalah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang perlu ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi berfikir orang Minang. Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat dalam suatu nagari untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan. Yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.³ Dahulu misalnya, setiap muslim Minang pulang haji memakai seroban sekarang sudah biasa memakai peci, malah sering tanpa tutup kepala.

Dan adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh Ninik mamak Pemangku Adat sebagai wadah

² Amir MS, Ibid, hal. 145.

³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung Jakarta, hal 145.

penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Misalnya adat main layang- layang sesudah musim panen, adat berburu pada musim panen, adat main sepak raga waktu senggang sesudah kesawah, adat bertegak batu sesudah beberapa hari mayat terkubur.⁴

Perkawinan adalah satu asas pokok dalam pergaulan hidup yang mempunyai tujuan yang amat mulia yaitu mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Di samping itu perkawinan juga dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.

Sehubungan dengan tujuan perkawinan ini, Ter Haar Bzn mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah suatu usaha yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang akan meneruskan golongan itu.⁵

Perkawinan dalam ajaran Islam berdasarkan kepada perintah Allah dan mengikuti Sunnah Rasul yang mulia, selain itu perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.⁶

Dalam versi Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau Mitsaqan qalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan perkawinan

⁴ Amir Syarifudin, Ibid, hal. 187.

⁵ Ter Haar Bzn, di Indonesiakan oleh K, Ng. Soebekti Poesponoto, *Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cetakan ke 12 PT. Prdyna Paramita, Jakarta, 1999, hal. 187.

⁶ A. Zahdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Al Bayan, Bandung, 1994, hal 15 dan 17.

tersebut tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang).⁷

Sedangkan dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan lagi bahwa dasar perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kehidupan yang komunal dengan stelsel Matrilineal, di mana menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu.

Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama- sama maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak lepas dari masalah bersama.

Apabila dilihat pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat Minangkabau, maka dikenal pula istilah “Japuik manjapuik” dalam tata cara perkawinan adat Minangkabau. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa tata cara

⁷ Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Pasal 1 Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

adat manjapuik calon suami (japuik manjapuik marapulai) ini adalah merupakan salah satu bentuk tingkat adat nan diadatkan, di mana hanya berlaku pada daerah atau nagari tertentu saja.

Di dalam daerah Adat Minangkabau, adat perkawinan “bajapuik” (dijemput) ini sampai sekarang masih tetap terlihat dan terpakai adalah didaerah Padang Pariaman. Pariaman adalah Daerah Rantau di lingkungan daerah Minangkabau. Daerah Rantau ini merupakan perluasan berbentuk koloni dari setiap Luhak. Sedangkan daerah Pariaman ini merupakan Rantau Luhak Agam yang meliputi dari Pesisir Barat sejak Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman.⁹

Di daerah Pariaman terdapat ciri khusus dalam memberikan penilaian pada kaum laki- laki (tinggi rendahnya derajat kaum laki- laki), terutama menyangkut masalah gelar adat. Di daerah Pariaman untuk golongan laki- laki di kenal dengan 4 (empat) macam gelar, yaitu : **Sidi, Bagindo, Sutan dan Uwo.**

Gelar Sidi, Sutan ini adalah pengaruh dari masuk dan berkembangnya agama Islam di Pantai Barat Pariaman, yaitu tempat berkembangnya agama Islam yang pertama di Minangkabau. Asal mula gelar Sidi dan Sutan adalah pengaruh bahasa Arab, yaitu Saidina untuk Said dan Sultan untuk Sutan, sedangkan Bagindo berasal dari Baginda yang merupakan pengaruh dari bahasa Sansekerta atau sanskrit. Ke tiga gelar tersebut dipergunakan untuk penduduk asli Pariaman.

⁹ Amir Syarifuddin, Ibid. hal. 123.

Sedangkan untuk penduduk yang bukan asli Pariaman dipanggilkan dengan sebutan Uwo.

Sesuai dengan istilah Minangkabau yang menyatakan “adat menurun syarak mandaki atau syarak ma ngato adat mamakai” (adat menurun ketentuan agama mendaki atau ketentuan agama mengatakan adat yang memakai), maka percampuran antara ketentuan agama (Islam) dan adat yang melahirkan atas gelar-gelar adat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini, dimana ketentuan adat dipengaruhi oleh ketentuan agama (Islam).

Sistem Matrilineal yang berlaku pada masyarakat hukum adat Minangkabau turut pula mempengaruhi sistem, perkawinannya yang bersifat eksogami yaitu perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan berasal dari satu klan melainkan dari luar klan.

Sistem perkawinan yang bersifat eksogami menghasilkan suatu bentuk perkawinan yang sangat dikenal pada masyarakat Minangkabau, yaitu perkawinan semendo, dimana kedua belah pihak atau kaum kerabat pasangannya, karena menurut struktur masyarakat Minangkabau setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing meskipun telah diikat suatu perkawinan dan telah melahirkan keturunan. Menurut bentuk perkawinan asli masyarakat Minangkabau, laki-laki atau suami dianggap hanya sebagai “tamu” atau “orang sumando” saja yang datang menetap pada malam hari lalu pagi harinya kembali ke rumah orang tuanya. Hal ini menyebabkan peranan laki-laki atau suami terhadap isteri dan

anak- anaknya sangat kecil, sedangkan peranan sebagai seorang mamak sangat menonjol.

Dengan adanya bentuk perkawinan semendo yang berlaku di Minangkabau maka peranan seorang mamak terhadap kemenakan- kemenakannya sangatlah penting, karena tugas dan kewajiban seorang mamak (saudara laki- laki dari ibu) terhadap kemenakannya baik laki- laki maupun perempuan tidak ubahnya seperti tugas dari seorang ayah pada masyarakat yang bukan masyarakat Minangkabau. Namun letak perbedaannya adalah seorang mamak akan berhadapan dengan lebih banyak kemenakan jika mamak itu mempunyai banyak saudara perempuannya, sedangkan peranan seorang ayah hanya terhadap anak- anaknya saja.

Anak- anak dari saudara perempuannya dididik dan diasuh oleh mamaknya, sehingga apabila anak- anak itu telah besar, mereka juga akan membalas guna kepada mamaknya atas apa yang telah diberikan mamaknya. Hal ini menimbulkan kewajiban- kewajiban timbal balik antara mamak dan kemenakan, termasuk mencarikan jodoh buat anak kemenakannya sampai pada acara perkawinan dilaksanakannya.

Perkembangan peranan mamak sekarang sudah mulai mengalami pergeseran. Hal tersebut disebabkan oleh budaya merantau orang Minangkabau. Yang semula berbentuk perkawinan semendo bertandang berubah menjadi perkawinan semendo menetap. Perkembangan bentuk perkawinan ini menuju kearah terbentuknya keluarga inti (nuclear family) yang terdiri dari ayah ibu dan anak- anak.

Jadi peran ayahlah yang menonjol terhadap keluarga dan anak- anaknya termasuk masalah perkawinan anak- anaknya. Sekarang anak- anak pada masyarakat Minangkabau khususnya pada Nagari Sintuk telah diberikan kebebasan untuk mencari teman hidup mereka masing- masing. Sementara orang tua dan mamak hanya mengapikan (menyatukan) dua anak manusia yang saling suka.

Sekarang antara mamak dengan ayah sudah terdapat saling kerjasama yang baik dalam mengurus anak kemenakan bagi mamak dan anak bagi ayah. Kerjasama ini khususnya dalam bidang perkawinan anak kemenakan.

Perkawinan Bajapuik sekarang ini tidak lagi merupakan tanggungjawab mamak sendiri tetapi juga tanggungjawab ayah selaku orang tua dalam keluarga. Sebagai contoh dalam pemberian uang jempunan, yang membayar uang jempunan sekarang bukan lagi mamak tatapi adalah ayah. Apabila ayah tidak sanggup memikul sendiri maka mamak akan berusaha membantu untuk memenuhi uang jempunan tersebut¹⁰.

Dari hal- hal yang diuraikan di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Perubahan Peranan Mamak dalam Perkawinan Bajapuik pada masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman.

¹⁰ Pengamatan Sementara Penulis di Lapangan

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perubahan peranan Mamak terhadap kemenakannya dalam perkawinan Bajapuik ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi perubahan peranan mamak tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk :

1. Mengetahui perubahan peranan mamak terhadap kemenakannya dalam perkawinan Bajapuik di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman dewasa ini.
2. Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi perubahan peranan mamak tersebut .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan tercapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat ilmiah, yaitu hasil penelitian ini akan dapat sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Hukum tentang bidang Hukum Adat, khususnya pengembangan Ilmu Hukum tentang Perkawinan Adat di Minangkabau (khususnya tentang perkawinan “bajapuik”) dan dapat juga

secara umum sebagai sumbangan bagi ilmu atau dapat merupakan sebagai bahan bacaan bagi para pendidik dan dosen Hukum Adat.

2. Manfaat praktis, dalam hal ini bermanfaat bagi pemecahan masalah dengan solusi yang tepat bila timbul konflik tentang keberadaan Perkawinan “Bajapuik” dewasa ini khususnya dalam kehidupan masyarakat Adat Pariaman.

E. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut ;

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu ;

- 1.1.Latar belakang; yang antara lain menguraikan perubahan peranan mamak terhadap kemenakannya dalam perkawinan bajapuik pada masyarakat Nagari Sintuak.
- 1.2.Perumusan masalah; yaitu permasalahan yang terdapat dalam perubahan peranan mamak terhadap kemenakannya dalam perkawinan bajapuik pada masyarakat Nagari Sintuak.
- 1.3.Tujuan penelitian; untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang ada.
- 1.4.Sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu;

- 2.1. Masyarakat hukum adat; yang membahas tentang Tinjauan masyarakat hukum adat, Garis keturunan masyarakat hukum adat, Struktur masyarakat hukum adat Minangkabau.
- 2.2. Tinjauan umum tentang perkawinan; yang membahas tentang perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan menurut hukum Islam, Perkawinan menurut hukum adat.
- 2.3. Kedudukan mamak dalam hukum adat Minangkabau; yang membahas tentang Pengertian mamak dalam masyarakat Minangkabau, Hak dan kewajiban seorang mamak.
- 2.4. Sistem perkawinan pada masyarakat Minangkabau; yang membahas tentang bentuk perkawinan pada masyarakat Minangkabau, Perkawinan yang ideal bagi orang Minangkabau

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari 6 (enam) sub bab yaitu ;

- 3.1. Metoda pendekatan; yang membahas pendekatan apa yang dipakai dalam penelitian.
- 3.2. Spesifikasi penelitian; yang membahas data- data yang ada di lapangan.
- 3.3. Sumber data; yang membahas tentang data primer dan data sekunder.
- 3.4. Penentuan populasi dan sample; yaitu apa saja populasi dan sample yang diambil.
- 3.5. Teknik pengumpulan data; yaitu teknik dengan menggunakan wawancara langsung kepada interviewee.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu;

4.1. Hasil, yang membahas tentang ;

4.1.1. Gambaran umum Nagari Sintuak; yang terdiri dari Sejarah pembentukan Nagari Sintuak, Letak geografis, Demografi, Agama, Pendidikan, Mata pencarian.

4.1.2. Mamak pada masyarakat Nagari Sintuak; yang membahas siapa mamak tersebut menurut masyarakat Nagari Sintuak.

4.1.3. Kemenakan pada masyarakat Nagari Sintuak; yang membahas tentang siapa kemenakan tersebut menurut masyarakat Nagari Sintuak.

4.1.4. Perkawinan bajapuik pada masyarakat Nagari Sintuak; yang membahas tentang perkawinan bajapuik pada masyarakat Nagari Sintuak.

4.2. Pembahasan, yang membahas tentang ;

4.2.1. Perubahan peranan mamak terhadap kemenakan dalam perkawinan bajapuik; yaitu perkembangan peranan mamak terhadap kemenakan dalam perkawinan bajapuik dewasa ini.

4.2.2. Faktor yang mempengaruhi perubahan peranan mamak; berisi faktor- faktor yang mempengaruhi perubahan peranan mamak tersebut adalah Faktor ekonomi, Faktor budaya merantau orang Minang, Faktor pendidikan.

Bab V Penutup, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu ;

- 5.1 Kesimpulan; yang membahas tentang hasil permasalahan didapat dari hasil penelitian di lapangan.
- 5.2. Saran; yang membahas tentang masukan- masukan yang penulis harapkan agar menjadi perhatian bagi para pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Hukum Adat

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat dan hukum adat yang berbeda. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut adalah sistem masyarakat yang berlaku pada masing-masing daerah.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama. Dalam rangka penyelidikan hukum, apabila ingin memahami segala hubungan hukum dan tindakan hukum di bidang perkawinan menurut hukum adat, dibidang pertalian sanak keluarga menurut adat dan dibidang waris menurut adat, maka perlu mempelajari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang Masyarakat Hukum Adat , yaitu sebagai berikut : Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan- kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.¹¹

¹¹ Hazairin , *Demokrasi Pancasila* , Bina Aksara , Jakarta , 1970 , hal. 44.

Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan- kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari masyarakat hukum adat ini terlihat dari kerjasama yang kuat seperti gotong- royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum.

A.1. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat

Pada dasarnya Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dapat dibagi 2 (dua) golongan menurut susunan masyarakatnya, yaitu berdasarkan lingkungan daerah (teritorial) dan pertalian keturunan (genealogis).

Masyarakat Hukum Adat yang disusun berdasarkan lingkungan daerah (teritorial) adalah Masyarakat Hukum Adat yang para anggotanya merasa bersatu dengan adanya ikatan diantara mereka masing- masing dengan tanah yang didiaminya sejak kelahirannya secara turun- temurun bersama orang tua serta nenek moyangnya.

Masyarakat Hukum Adat yang disusun berdasarkan pertalian keturunan (genealogis) adalah Masyarakat Hukum Adat yang para anggotanya merasa terikat dalam satu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama, menurut garis ibu atau ayah atau keduanya

Keturunan berarti adanya hubungan darah antara seseorang dengan orang lain yang berasal dari terbentuknya suatu perkawinan. Misalnya sebagai contoh adalah kesatuan unit yang terkecil dalam masyarakat yang disebut keluarga atau Gesin terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Anak-anak yang sudah dewasa akan membentuk suatu keluarga dengan menghasilkan keturunan, dan demikian seterusnya secara turun-temurun.

Dengan adanya keluarga-keluarga tersebut maka akan terbentuk suatu klan, suku ataupun kerabat dalam suatu lingkungan Masyarakat Hukum Adat. Dengan kata lain keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan atau suku yang menginginkan klan atau sukunya tidak penuh, melainkan terus berkembang dengan adanya generasi penerus.

Dalam susunan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan keturunan (genealogis), berarti; Seseorang menjadi anggota masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang ayah asal (nenek moyang laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal melalui garis keturunan perempuan atau melalui garis keturunan ayah dan ibu¹²

Dengan prinsip garis keturunan (istilah yang digunakan Hazairin untuk sistem masyarakat), dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari individu sebagai keturunan (anggota keluarga), misalnya dapat menggunakan nama

¹² Bushar Mumamad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 32.

keluarga, berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan membantu sesama anggota keluarga, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.

A. 2. Garis Keturunan Masyarakat Hukum Adat.

Indonesia adalah negara yang kaya sekali dengan adat istiadatnya dan setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, hal tersebut terlihat dari garis keturunan masyarakat hukum adat.

Ada 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan dalam Masyarakat Hukum Adat berdasarkan genealogis yang dikenal di Indonesia, yaitu sebagai berikut ;

A. 2. 1. Garis Keturunan Parental

Masyarakat Hukum Adat yang bersistem kekeluargaannya didasarkan pada prinsip garis keturunan Bilateral adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu dan ayah yang diberi nilai dan derajat yang sama baik pihak keluarga ayah maupun pihak keluarga ibu.

Prinsip garis keturunan Bilateral ini dianut, antara lain oleh Masyarakat Hukum adat Bugis, Dayak di Kalimantan dan Jawa.

A. 2. 2. Garis Keturunan Patrilineal

Masyarakat Hukum Adat yang sistem kekeluargaannya didasarkan pada prinsip garis keturunan Patrilineal murni adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis laki-laki, sehingga setiap orang masuk ke dalam batas hubungan kekerabatan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya saja sedangkan semua kerabat ibunya berada di luar batas itu.

Prinsip Garis keturunan murni dikenal pada Masyarakat hukum Adat Batak. Disamping prinsip garis keturunan Patrilineal murni ada pula prinsip garis keturunan Patrilineal beralih- alih, yang sering dijumpai pada masyarakat hukum adat Bali dan Rejang.

Dalam prinsip garis keturunan Patrilineal beralih- alih ada kemungkinan untuk menarik garis keturunan melalui penghubung seorang perempuan yaitu tergantung pada bentuk perkawinan yang dilakukan oleh penghubung itu.

Pada masyarakat Patrilineal beralih- alih, bentuk perkawinan yang dilakukan adalah tanpa jujur, yang dikenal dengan sebutan Perkawinan tanpa jujur. Salah satu alasan dilakukannya perkawinan tanpa jujur tersebut, yaitu karena tidak mempunyai anak laki- laki sehingga patrilinealnya punah.

Perkawinan tanpa jujur berarti mengambil si suami sebagai anak laki-laki mereka sehingga si istri akan berkedudukan tetap sebagai anggota klannya dan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan itu akan menarik garis

keturunan melalui ayahnya (yang pada dasarnya telah menjadi anggota klan istri, sehingga suaminya itu merupakan anak laki-laki dari ayahnya si istri).

A. 2. 3. Garis Keturunan Matrilineal

Masyarakat Hukum Adat yang sistem kekeluargaannya didasarkan pada prinsip garis keturunan Matrilineal adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan kerana para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis perempuan, sehingga setiap orang akan masuk ke dalam batas hubungan kekerabatan dengan ibunya saja, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya berada di luar batas itu. Prinsip garis keturunan Matrilineal, dikenal pada Masyarakat hukum adat Minangkabau.

Menurut pendapat seorang sarjana bernama Bronislaw Malinowski berarti: Mereka hidup dalam satu ketertiban masyarakat yang di dalamnya kekerabatan dihitung menurut garis ibu semata-mata dan pusaka serta waris diturunkan menurut garis ibu pula. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, klan dan perkauman ibunya dan bukan dari ayah melainkan ibu, mamak dan bibinya seorang anak menerima warisan harta benda.

13

Pada Masyarakat Minangkabau, apabila ia perempuan maka hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun

¹³ Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center For Minangkabau, Padang, Indonesia, 1969, hal. 17.

perempuan, selanjutnya cucu laki- laki dan cucu perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan saja, dan selanjutnya piut laki- laki dan piut perempuan yang lahir dari cucu perempuannya. Seorang laki- laki Minangkabau dianggap tidak layak untuk memberikan keturunan kepada ibunya dan kerabat ibunya, ia hanya memperbanyak kerabat istrinya saja.

Berdasarkan tata susunan masyarakat Minangkabau yang menganut prinsip garis keturunan Matrilineal itu, maka dapat diuraikan bahwa dalam sebuah keluarga, ayah bukanlah termasuk anggota dari keluarga tersebut melainkan anggota dari paruiknya (berasal dari paruik seorang Gaek atau ibu dari nenek yang sama) sendiri dan tetap tinggal di dalam paruiknya.

Semua anak- anak baik laki- laki maupun perempuan dari saudara perempuan dipimpin oleh mamak (saudara laki- laki tertua dari ibu, seperti juga siayah merupakan mamak bagi kemenakan- kemenakannya di dalam paruiknya. Anak- anak dari saudara perempuan dididik, diasuh dan dipimpin oleh mamaknya, sehingga apabila anak- anak besar, mereka juga akan membalas guna kepada mamak mereka. Oleh karena itu timbullah kewajiban- kewajiban timbal balik antara mamak dan kemenakan.

Berdasarkan uraian prinsip garis keturunan Matrilineal diatas, maka jelaslah bahwa pada masyarakat Minangkabau peranan seorang laki-laki sebagai ayah terhadap anak- anaknya sangat kecil, sedangkan peranannya sebagai seorang mamak terhadap kemenakan-kemenakannya sangat menonjol.

A. 3. Struktur Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau hidup bergolong- golongan dan berkelompok-kelompok. Penggolongan dan pengelompokan tersebut berdasarkan faktor genealogis yaitu keturunan menurut garis ibu atau dikenal dengan prinsip garis keturunan Materilineal dan berdasarkan faktor teritorial (lingkungan daerah).

Penggolongan dan pengelompokan masyarakat di Minangkabau berdasarkan faktor genealogis adalah sebagai berikut :

1. Semande, berarti anak-anak yang lahir dari satu ibu.
2. Sajurai, berarti sama berasal dari satu perut seorang Nenek.
3. Saparuik, berarti sama berasal dari perut seorang Gaek (ibu dari nenek) dan masih merupakan bagian dari suku yang sama.
4. Sakampung, berarti kelompok- kelompok keturunan yang kecil (sub- klan) yang berasal kumpulan paruik- paruik.
5. Sasuku, berarti sama berasal dari seorang niniak, yang menempati jenjang yang tertinggi dari susunan sasuku karena dari Niniak itulah suku itu dianggap berasal.¹⁴

Penggolongan semande makin lama makin bertambah dengan perkawinan yang dilakukan anak- anak baik laki- laki maupun perempuan sehingga terbentuklah jurai-jurai yang tinggal bersama di dalam sebuah Rumah Gadang (rumah asli Masyarakat Minangkabau) sedangkan suami atau ayah dari anak-anak tersebut tidak tinggal bersama melainkan tinggal bersama orang tuannya.

¹⁴ Amir M. S, *Tonggak Tuo Budaya Minang*, CV. Karya Indah, Jakarta, 1987, hal. 62.

Kelompok jurai- jurai tersebut membentuk Paruik- paruik yang tinggal dalam rumah gadang. Apabila anak- anak perempuan dari paruik tersebut menikah, sedangkan isi Rumah Gadang tersebut telah penuh dan tanah halamannya telah sempit maka didirikanlah bangunan rumah- rumah baru dekat dengan rumah semula. Demikian seterusnya secara turun- temurun ditempati rumah- rumah tersebut, sehingga akan dijumpai sekumpulan rumah yang berdiri berdekatan- dekatan, dan inilah yang dinamakan kampung.¹⁵

Jadi perkataan kampung ini berhubungan erat dengan anggota- anggota keluarga dari rumah yang masih berada dalam lingkungan sedarah (sesuku), sehingga kampung ini bukanlah suatu pengertian teritorial (daerah), seperti kampung atau perkampungan di luar Minangkabau.

Setiap Paruik dan setiap kampung dipimpin oleh seorang laki- laki yang berasal dari jurai tertua, yang disebut dengan Penghulu Andiko yang memimpin Paruik dan Penghulu Kampung yang memimpin Kampung.

Fungsi Penghulu Andiko atau Pengulu Kampung bersifat ganda, yaitu sebagai mamak dari jurainya sendiri dan sebagai mamak dari paruiknya atau kampungnya. Fungsinya sebagai Penghulu Andiko atau Penghulu kampung lebih banyak menghadapi persoalan- persoalan hidup dari anggota- anggota paruik anggota- anggota kampungnya.

¹⁵ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Renika Cipta, Jakarta, 1997, hal. 20.

Apabila sebuah Paruik, anggota- anggotanya berkembang begitu banyak sehingga menimbulkan cabang- cabang dari paruik itu sebagai kesatuan- kesatuan baru yang berkembang terus sepanjang perjalanan masa, maka akhirnya akan dijumpai suatu lingkungan yang anggota- anggotanya satu sama lain diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu. Lingkungan ini merupakan kesatuan yang dinamakan Suku.

Suku ialah suatu kesatuan masyarakat, dimana anggota- anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari seorang perempuan (disebut Niniak) yang menurunkan mereka.¹⁶

Pada mulanya Masyarakat Hukum Adat Minangkabau hidup dalam 4 (empat) suku, yaitu : Bodi, Caniago, Koto dan Piliang.¹⁷ Pembagian masyarakat dalam 4 (empat) suku di Minangkabau ini dimulai pada tingkatan perkembangan pertama dari perkauman Minangkabau, yang diciptakan oleh 2 (dua) orang leluhur pemegang kekuasaan di Minangkabau yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Salah satu dari pembagian tersebut adalah agar keturunan- keturunan mereka dapat melakukan perkawinan antar suku, akan tetapi mereka dilarang melakukan perkawinan endogami, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari satu suku.

Suku Bodi dan suku Caniago menganut aliran politik yang juga disebut Kelarasan Bodi Caniago yang dipimpin oleh Datuk Parpatih nan Sabatang,

¹⁶ Amir. M. S. op. cit. hal. 37.

¹⁷ A.A. Navis, *Alam Terkambang Jadi Guru*, Graffiti Press, Cet. 2, Jakarta, 1984, hal 121.

sedangkan suku Koto dan suku Piliang menganut aliran politik yang juga disebut Kelarasan Koto Piliang yang dipimpin oleh Datuk Katumanggungan.¹⁸

Kelarasan Bodi Caniago terdapat di daerah Tanah Agam, sedangkan Kelas Koto Piliang terdapat di daerah Tanah Datar dan di daerah Lima Puluh Koto. Struktur masyarakat Minangkabau menurut Kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Caniago berbeda. Menurut Koto Piliang, kampung merupakan sub klan dan suku merupakan gabungan dari kampung-kampung dan menurut Bodi Caniago suku merupakan sub klan.

Namun dengan adanya proses sejarah serta perkembangan masyarakatnya, maka jumlah suku makin lama makin bertambah banyak. Perkembangan pertambahan suku tersebut ada yang berkembang terus ada pula yang tidak berkembang karena kepunahan warganya.

Pertambahan jumlah suku lebih cepat, yang disebabkan karena adanya proses kelahiran, proses penggabungan suku atau pemisahan suku, pembukaan permukiman baru dan kedatangan orang asing. Oleh karena itu menurut pendapat seorang sarjana bernama Wilken, dikemukakan bahwa jumlah suku di Minangkabau mencapai kurang lebih 200 (dua ratus) buah suku.

Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya pada suatu Nagari yang semula mempunyai empat suku, seperti : Koto, Piliang, Jambak dan Melayu lalu mengalami perubahan komposisinya. Suku Koto berkembang dengan cara

¹⁸ A.A. Navis, Ibid, hal. 122.

pembelahan menjadi dua atau tiga, sedangkan suku Jambak lenyap karena kepunahan warganya.

Suku- suku yang makin lama makin bertambah jumlahnya tersebut, terbagi dalam kelompok- kelompok dan membentuk suatu Masyarakat hukum Adat atau Nagari. Nagari ialah : Persekutuan hukum yang berdiri di atas dasar faktor teritorial dan faktor genealogis, karena Nagari itu tertentu dimana batas-batasnya serta di dalam Nagari itu harus ada sekurang- kurangnya 4 (empat) suku.¹⁹

Nagari merupakan permukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, yang didiami sekurang- kurangnya 4 (empat) suku penduduk dengan Penghulu Pucuk atau Penghulu Tuo selaku pimpinan pemerintahan tertingginya.

Fungsi Penghulu Pucuk atau Penghulu Tua yaitu sebagai pimpinan yang diangkat bersama oleh kaumnya sesuai rumusan adat, sebagai pelindung bagi semua anggota kaumnya dan sebagai hakim yang memutuskan semua masalah dan sengketa dalam kaumnya.

Baik buruknya keadaan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan akan ditentukan oleh baik buruknya Penghulu Pucuk dalam menjalankan fungsinya tersebut di atas. Oleh karena itu yang harus di angkat sebagai Penghulu Pucuk adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian tertentu sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan.

¹⁹ Chairul Anwar, op. cit, hal. 24.

Pemerintahan dalam Nagari selalu didasarkan kepada musyawarah yang dinamakan rapek (rapat), dan di dalam rapat inilah segala sesuatu dibicarakan terlebih dahulu sebelum roda pemerintahan dijalankan.

Susunan pemerintahan di dalam lingkungan adat Kelarasan Bodi Caniago, pemerintahan sebagai nagari bersama-sama diselenggarakan oleh panghulu-panghulu andiko di dalam suatu permusyawaratan yang dinamakan ; Kerapatan Nagari. Panghulu-panghulu Andiko mempunyai derajat yang sama serta bersama-sama memegang tampuk kekuasaan dalam nagari.

Susunan Pemerintahan di dalam lingkungan adat Kelarasan Koto Piliang, akan dijumpai paruik- paruik yang bergabung menjadi suku- suku, yang diketuai oleh seorang Penghulu suku. Penghulu suku dan penghulu andiko bersama-sama memimpin suku mereka di dalam musyawarah (kerapatan suku) dan selanjutnya Penghulu suku ini dengan penghulu suku yang lain bersama-sama memegang pemerintahan Nagari, dengan sebutan Datuak Nan Kaampek Suku. Lalu dari keempat Penghulu suku tadi, dipilihlah seorang Penghulu Pucuk yang merupakan pucuk nagari yang memegang pemerintahan nagari bersama-sama dengan penghulu-penghulu suku yang lain.

Perbedaan antara keselarasan Bodi Caniago dan Keselaran Koto Piliang yang telah diuraikan, antara lain susunan masyarakatnya, susunan pemerintahan Nagari dan susunan balai adat tempat bermusyawarah dimana menurut Kelarasan Bodi Caniago merupakan bangunan yang datar, karena pemegang kekuasaan pemerintahan di tangan para Penghulu suku yang mempunyai kedudukan yang

sederajat dengan hak, martabat dan tugas kewajiban yang sama atau disebut dengan pepatah adat : “duduk sama rendah tegak sama tinggi”. Sedangkan menurut keselaran Koto Piliang merupakan bangunan yang bertingkat atau disebut dengan pepatah adat : “bajanjang naiak batanggo turun,” artinya kedudukan panghulu pucuk, panghulu suku dan panghulu andiko bertingkat sesuai dengan martabat dan tugas kewajibannya masing- masing.

Namun perbedaan antara kedua kelarasan tersebut tidak bertahan lama karena adat kelarasan Bodi Caniago dan kelas koto Piliang sudah campur baur dipakai dalam satu nagari, dan keduanya saling pengaruh mempengaruhi.²⁰

Unsur- unsur Koto Piliang dan Bodi Caniago dapat ditemukan dalam nagari yang sama, sekalipun nagari itu biasanya ditandai oleh suku yang lebih dominan. Nagari di Tanah Agam lebih banyak dikuasai oleh suku Bodi Caniago, nagari di Limapuluh Koto lebih banyak dikuasai oleh suku Koto Piliang dan nagari di Tanah Datar dikuasai oleh suku campuran ada Bodi Caniago dan Koto Piliang.

Dengan demikian pengelompokan ke dalam suku Koto Piliang dan Bodi Caniago tidak lagi dirasakan penting dimasa sekarang ini, oleh karena perbedaan yang tinggal dari kedua suku tersebut hanya sedikit.

Dilihat dari sudut bentuk masyarakatnya, di Minangkabau terdapat Masyarakat Hukum Adat bertingkat yaitu suatu masyarakat Hukum Adat dimana di dalamnya terdapat masyarakat Hukum Adat Atasan dan beberapa Masyarakat

²⁰ Mansoer M.D. *Sejarah Minangkabau*, Bharatara, Jakarta, 1970, hal. 14.

Hukum Adat Bawahan yang tunduk pada Masyarakat Hukum Adat Atasan tersebut.

Pengelompokan masyarakat bertingkat di Minangkabau terdiri dari Masyarakat Hukum Adat Atasan dan Masyarakat Hukum Adat Bawahan. Masyarakat Hukum Adat Atasan yaitu Nagari, yang merupakan suatu Masyarakat Hukum Adat karena mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota masyarakat hukum tersebut. Dengan kata lain Nagari di Minangkabau sebagai suatu kesatuan kenegaraan atau sebagai sebuah negara kecil.

Sedangkan Masyarakat Hukum Adat Bawahan di Minangkabau adalah suku yang tunduk pada Masyarakat Hukum Adat Atasan, Nagari. Segala golongan suku yang bertempat tinggal di dalam nagari berkedudukan setingkat dan bersama-sama merupakan badan persekutuan teritorial, dimana tiap-tiap golongan suku dalam suatu nagari mempunyai daerah sendiri-sendiri.

Pimpinan Nagari sebagai Masyarakat Hukum Adat Atasan terletak di tangan permufakatan para penghulu Andiko yang sederajat kedudukannya. Kerapatan Nagari ini merupakan lembaga kekuasaan yang tertinggi. Sedangkan pimpinan Masyarakat Hukum Adat Bawahan ada di tangan kepala suku yang dianggap sebagai pusat kekuasaan suku.

Dalam menjalankan pemerintahan Adat, Masyarakat Hukum Adat Bawahan harus tunduk pada Masyarakat Hukum Adat Atasan, misalnya dalam

hal penyeleggaran hukum adat yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat hukum. Dalam memutuskan segala sesuatu menyangkut masalah tersebut keputusan Masyarakat Hukum Adat Bawahan harus mendapat persetujuan oleh Kerapatan Nagari sebagai lembaga kekuasaan yang tertinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai struktur masyarakat Hukum Adat Minangkabau, maka jelaslah bahwa semua kedudukan dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau, baik sebagai kepala jurai, panghulu andiko, panghulu kampuang, panghulu suku maupun panghulu pucuk dipegang oleh laki-laki Minangkabau, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap kemenakan- kemenakannya, kaumnya dan bahkan dalam memimpin sebuah nagari.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan berpasangan- pasangan yaitu ada laki- laki dan ada wanita. Dalam kehidupan sehari- hari manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lain sebagai teman hidup mereka. Oleh sebab itu manusia dinamakan makhluk sosial.

Dalam dinamika kehidupan, manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan sehari- hari baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka baru manusia tersebut merasa puas dalam menjalankan kehidupan. Dalam hal ini termasuk kebutuhan untuk melanjutkan keturunan mereka. Untuk melanjutkan keturunan manusia akan membutuhkan pasangan hidup.

Perkawinan adalah merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, guna membentuk sebuah rumah tangga, yang terdiri dari ibu, bapak dan anak- anak. Anak merupakan generasi penerus dari sebuah keluarga, agar keluarga tersebut tidak punah.

B. 1. Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan berlakunya Undang- undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai peraturan pelaksanaannya, maka sejak tanggal 1 Oktober 1975 berlakulah secara yuridis formal Hukum Nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1, Undang- undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ini adalah ikatan lahir bathin yang harus didasarkan kepada persetujuan kedua belah pihak yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan perkataan “ikatan lahir” adalah suatu ikatan yang dapat dilihat secara nyata yang berujud hubungan antara seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu keluarga atau rumah tangga.

Adapun “ikatan bathin” ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada yang berupa kehendak dari seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk mengikatkan diri dalam suatu keluarga, tanpa adanya ikatan bathin ini iktan lahir akan rapuh.

Bila diperhatikan bahwa sungguh sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang diinginkan oleh undang- undang ini, tidak hanya melihat dari segi ikatan lahir saja, tapi sekaligus ikatan pertautan kabathinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.²¹

Disamping itu undang- undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga menganut asas monogami. Adapun tujuan asas monogami ini adalah supaya seorang pria hanya diperbolehkan beristri satu agar rumah tangga yang telah dibina tersebut tidak menjadi hancur. Hal ini juga berkaitan dengan kemakmuran anak- anak dalam perkawinan tersebut, agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut terjamin hidupnya sampai mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri kelak.

B. 2. Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah merupakan perbuatan yang suci atau sakral yaitu suatu perikatan antara laki- laki dan

²¹ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Treading co Medan, Medan, 1975, hal. 11.

perempuan dalam memenuhi perintah Allah Swt dan sunah rasul diantaranya adalah sebagai berikut :

Maka kawinilah perempuan- perempuan yang kamu sukai dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja.

Dari Abdullah bin Mas'udra, ia berkata : Rasulullah saw, bersabda kepada kami : Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa menjadi penjaga baginya.²²

Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah merupakan suatu ikatan lahir bathin atau jasmani dan rohani antara laki- laki dan perempuan yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga dan kerabatnya.

Di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perumusan mengenai pengertian perkawinan berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 2 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau muttsaqan qalidhan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³

²² Mohammad Rifai, *Figh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hal. 455-456.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hal. 67.

Dengan perkataan lain perkawinan yang disebut dengan istilah “nikah” adalah merupakan pergaulan antara seorang laki- laki dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, dengan dasar sukarela serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Mengenai pengertian perkawinan ini ada perbedaan pendapat dikalangan para sarjana Hukum Islam di dalam merumuskan pengertian perkawinan. Namun demikian perbedaan pendapat itu sebenarnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh- sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan pendapat ini hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukan unsur- unsur yang sebanyak- banyaknya dalam merumuskan tentang pengertian perkawinan disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur dalam perumusan pengertian perkawinan pada pihak lain.

Walau ada perbedaan pendapat mengenai perumusan pengertian perkawinan ini akan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat tersebut yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian, perikatan antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan.

Perjanjian disini tidak seperti perjanjian pada umumnya, akan tetapi perjanjian dalam nikah ini merupakan perjanjian yang suci antara seorang laki- laki dan perempuan untuk membina keluarga dan untuk memperoleh keturunan yang sah.

B. 3. Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman.

Dengan berlakunya Undang- undang Perkawinan yaitu Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, maka syarat- syarat sahnya perkawinan diatur oleh Undang- undang tersebut kecuali bagi mereka yang tidak menganut suatu agama ... maka syarat sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum adat mereka yang memang sudah berlaku bagi mereka sebelum diundangkannya undang- undang perkawinan ini.²⁴

Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda- beda.²⁵ Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.

Pada masyarakat yang menganut sistem Matrilineal seperti di Minangkabau masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh mamak. Seorang mamak peranan yang sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan perkawinan.

Tanggung jawab mamak dimulai dari mencarikan jodoh buat kemenakannya. Orang yang dicarikan tersebut adalah orang yang dipandang

²⁴ H. R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2002, hal. 175.

²⁵ Ter Haar Bzn, *Asas- asas Dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 159.

pantas untuk dijadikan urang sumando (orang semendo) yaitu orang yang mempunyai budi perkerti yang baik dan mempunyai latar belakang atau keturunan baik- baik.

Apabila mamak memandang orang tersebut telah sesuai dengan kriteria yang diinginkan maka mamak akan melamarnya kepada mamak dari calon urang sumando (orang semendo) tersebut . Disinilah mamak antara pihak perempuan dengan pihak laki- laki melakukan perundingan masalah perkawinan.

Kalau telah terdapat kata sepakat antara kedua mamak tersebut maka pihak keluarga perempuan akan mengantarkan sirih dan makanan berupa nasi lemak (nasi enak) kepada keluarga pihak laki- laki berikut dengan uang jemputan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Uang jemputan ini akan dikembalikan lagi dua kali lipat apabila pihak keluarga laki- laki membatalkan perjanjian perkawinan yang telah di sepakati, tetapi apabila pihak keluarga perempuan yang membatalkan perjanjian perkawinan tersebut maka uang jemputan yang telah diserahkan tersebut menjadi hilang dengan sendirinya.

C. Kedudukan Mamak Dalam Hukum Adat Minangkabau

Seperti telah kita ketahui bahwa dalam masyarakat hukum adat Minangkabau berlaku sistem Materilineal atau sistem masyarakat keibuan, yang artinya setiap anggota masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan melalui garis ibunya bukan dari ayahnya.

Sistem Materilineal ini juga mempengaruhi sistem perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Minangkabau. Dengan sistem perkawinan eksogami, maka kedua belah pihak atau salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak lebur dalam satu keluarga karena masing- masing masih merupakan anggota dari paruknya. Si suami masih menjadi anggota paruk atau kaumnya dan si istri juga masih menjadi anggota paruk atau kaumnya, sedangkan anak-anak baik perempuan maupun laki- laki akan menarik garis keturunan melalui ibunya dan keluarga ibunya serta berhak mewaris harta dari ibunya dan keluarga ibunya.

Sistem perkawinan eksogami pada masyarakat Minangkabau melahirkan bentuk perkawinan semendo, dimana menurut pola perkawinan aslinya suami hanya dianggap sebagai “tamu” atau “orang sumando” yang datang menetap di rumah istrinya pada malam hari saja dan keesokan paginya kembali ke rumah orang tuanya, untuk bekerja mengolah tanah kepunyaan orang tuanya dan saudara- saudara perempuannya serta mempunyai tugas dan kewajiban sebagai mamak bagi anak- anak dari saudara- saudara perempuannya.

Dengan keadaan demikian, lalu siapa yang akan memegang kekuasaan orang tua, memberikan pendidikan dan kesejahteraan kepada anak- anak yang lahir dari perkawinan tersebut, apabila hubungan anak- anak dengan ayahnya kurang rapat karena mereka hanya bertemu dengan ayahnya pada malam hari saja. Ikatan satu- satunya antara anak dan ayahnya ialah karena ayahnya itu

adalah suami ibunya.²⁶ Disinilah pentingnya peranan saudara laki- laki dari pihak ibu yang disebut mamak.

C. 1. Pengertian Mamak Dalam Masyarakat Minangkabau.

Bagi seorang anggota masyarakat Minangkabau, saudara laki- laki ibunya adalah mamaknya dan dia adalah kemenakan saudara laki- laki ibunya. Bagi seorang laki- laki, anak saudara perempuannya merupakan kemenakannya dan dia adalah mamak anak saudara perempuannya.

Mamak adalah laki- laki yang bertanggung jawab menjadi pemimpin kemenakannya baik laki- laki maupun perempuan di pihak ibu dalam lingkungan sosial yang terkecil, kaum, kampung dan sampai lingkungan yang lebih besar seperti Nagari.

Menurut adat Minangkabau, bagi seorang laki- laki yang paling dekat kepadanya ialah kemenakannya, yang menurut Hukum Adat harus mewaris gelar, martabat, kekayaan dan apa saja yang dipunyai mamaknya. Sebaliknya, anaknya sendiri menurut adat bukan seorang anaknya, yang sesuku dengan dia, dan karena itu menurut hukum adat tidak pusaka mewarisi.

Anak- anak dari saudara perempuannya dididik dan diasuh oleh mamaknya, sehingga apabila anak- anak itu telah besar, mereka juga akan membalas guna kepada mamaknya atas apa yang telah diberikan mamaknya. Hal ini menimbulkan kewajiban- kewajiban timbal balik antara mamak dengan

²⁶ Muhammad Radjab, op. cit. hal. 59.

kemenakan, sehingga akhirnya menimbulkan suatu tertib aturan bermamak berkemenakan. Tertib bermamak berkemenakan ini hanya merupakan konsekwensi saja dari tata susunan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Materilineal.

Adat Minangkabau mengajarkan, bahwa yang dimaksud kemenakan ialah laki- laki atau perempuan dari pihak ibu yang dipertanggungjawabkan oleh mamaknya.²⁶

Kemenakan terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu :

1. Kemenakan bertali darah, yaitu kemenakan kandung yaitu anak- anak dari saudara- saudara perempuan mamak.
2. Kemenakan bertali sutera, yaitu kemenakan jurai yang lain tapi masih berhubungan darah dengan jurai mamak.
3. Kemenakan bertali emas, yaitu kemenakan dibawah lutut, orang yang bekerja pada kita dengan diberi mas (uang) dan dengan persetujuannya dijadikan kemenakan.
4. Kemenakan bertali budi, yaitu orang- orang yang hidup mencengkam terbang menumpu terjadi dari orang- orang yang pindah dari tempat asalnya ke tempat baru dan di tempat yang baru mencari mamak baru.²⁷

Seorang mamak dapat dibedakan menurut keturunan dan fungsinya, sebagai berikut :

²⁶ N.M. Rangkoto, Dt. Bandaro, *Hubungan Mamak Dengan Kemenakan Dahulu Dan Sekarang Serta Pasambahan Adat*, Bukittinggi, 1984. hal. 7.

²⁷ Chairul Anwar, *Ibid.* hal. 87.

- a. Apabila dia merupakan saudara kandung dari ibu, dinamakan Mamak kandung.
- b. Apabila dia menjadi tungganai dari sebuah rumah, dia dinamakan mamak rumah atau tungganai rumah.
- c. Apabila dia merupakan laki- laki tertua dari kelompok keluarga di pihak ibu, meskipun rumah meraka telah terdiri 2 (dua), atau 3 (tiga) buah rumah, maka dia dinamakan mamak kepala waris.²⁸

Ketiga mamak tersebut masing- masing mempunyai fungsi sesuai dengan sebutannya, misalnya Mamak Kepala Waris mempunyai wewenang dalam mengurus masalah harta pusaka keluarga, menjaga dan melindungi harta pusaka tersebut untuk kemenakan- kemenakannya. Mamak Rumah mempunyai wewenang penuh didalam rumah gadang, misalnya dalam melaksanakan perkawinan dari kemenakan- kemenakan perempuannya, mengatur segala persiapan dalam menerima jenazah dari anggota rumah gadang yang disemayangkan di rumah gadang tersebut.

Namaun yang menjadi mamak kepala waris dan mamak rumah tidak terbatas pada mamak kandung saja, misalnya peranan mamak kepala waris di pegang oleh saudara laki-laki kedua dari pihak ibu dan sebagainya, karena di dalam satu rumah gadang terdiri dari beberapa anak laki- laki sebagai anggota keluarga.

²⁸ N. M. Rangkoto, op. cit., hal 6.

Dalam hal membicarakan urusan keluarga pihak istri, si suami atau orang sumando ini jarang sekali diajak berunding bersama, kecuali hanya sekedar basa basi. Kadang- kadang orang sumando bahkan tidak dibawa berunding dalam memilih pasangan- pasangan untuk anak- anaknya sendiri apabila waktunya sudah tiba untuk diperjodohkan. Dan banyak urusan lainnya yang diserahkan kepada istri dan kepada anggota kerabatnya.

Anadaikata dia seorang laki- laki yang telah yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting di dalam kaum pesukuannya, dengan tidak mengambil ukuran dari segi umurnya baik muda ataupun tua, dinamakan Penghulu.

Penghulu diwakili oleh panungkek penghulu yang dipilih dan diangkat dari salah seorang mamak (mamak kandung, mamak rumah atau tungganai rumah, mamak kepala waris).

Kumpulan yang merupakan dewan yang terdiri dari mamak- mamak (mamak kandung, mamak rumah, mamak kepala waris, panungkek penghulu dan penghulu) dinamakan juga Niniak Mamak. Niniak Mamak inilah yang memegang kekuasaan pemerintahan adat dalam nagari-nagari di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas, pada umumnya setiap laki- laki di Minangkabau, pasti menjadi mamak di pihak ibu. Sekurang- kurangnya sebagai mamak kandung dari kemenakan yang bertali darah. Ada kemungkinan pula seorang laki- laki Minangkabau tersebut merangkap sebagai mamak rumah (tunganai rumah), mamak kepala waris, panungkek penghulu atau penghulu. Oleh karena semua laki- laki di Minangkabau itu kemungkinan menjadi mamak,

maka dengan sendirinya semua laki-laki di Minangkabau menjadi pemimpin, menjadi orang yang bertanggungjawab, hanya besarnya tanggungjawab itu berbeda- beda sesuai menurut fungsi atau peranan yang di pegangnya masing-masing.

C. 2. Hak dan Kewajiban Seorang Mamak.

Ada pepatah adat yang merupakan dasar pedoman bagi kehidupan keluarga di Minangkabau, yang menyatakan hubungan antara mamak dan kemenakannya, yang berbunyi sebagai berikut :

“anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung di patenggangkan.”

Artinya yaitu kewajiban dari si ayah memangku anaknya dengan minum serta pakaian, sedangkan sebagai mamak dia harus menimbang kemenakannya dengan asuhan pelajaran, sehingga dengan demikian bagi anak- anak orang Minangkabau ada dua tempat bersandar, pertama bapak dan kedua mamaknya, atau dengan pepatah adat dikatakan : mamak karano adat bapak karano darah.²⁹

Dalam rangka terbentuknya tertib aturan bermamak kemenakan, maka tugas mamak dan kemenakan menurut adat, dapat diperhatikan pepatah petitihi antara lain sebagai berikut :

1. Mamak kayo di adat kemenakan murah menurut.

²⁹ Chairul Anwar, op. cit. hal 83.

Artinya : Seorang mamak, baik mamak kandung, mamak/tungganai rumah, mamak kepala waris, panungkek dan niniak mamak mempunyai pengetahuan yang luas tentang seluk beluk adat Minangkabau, tambo/sejarah Minangkabau, silsilah keturunan nenek moyangnya atau sekurang- kurangnya tambo/sejarah dari nagari tempat kelahirannya. Dan kemenakan juga mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat istiadat kampung dan tidak ada melakukan pelanggaran adat, kerana mereka patuh dan menuruti segala ketentuan adat yang diperolehnya secara turun temurun.³⁰

2. Kemenakan seperintah mamak, mamak seperintah penghulu, penghulu seperintah “bana”.

Hal ini menggambarkan susunan masyarakat Minangkabau yang demokratis secara bertingkat, berjenjang naik bertangga turun. Dalam menghadapi suatu masalah dari yang kecil sampai yang besar, kemenakan akan meminta mamaknya menyelesaikannya. Kemudian apabila mamak tidak dapat menyelesaikannya maka diminta bantuan penghulu, dan sampai kepada kata mufakat sebagai penyelesaian masalah tersebut.³¹

3. Mamak menunjuk mengajari, malam dengar- dengarkan siang lihat- lihati.

³⁰ N. M. Rangkoto, op. cit. hal. 11.

³¹ N. M. Rangkoto, ibid. hal. 15.

Artinya : Mamak mempunyai tugas memberi petunjuk dan mengajari kemenakannya, agar setiap sikap tindakannya dan perbuatannya dalam hidup bermasyarakat tidak melakukan kesalahan.³²

4. Kemenakan menjunjung titah, menurut suruh menghentikan tegah.

Artinya : Kemenakan akan mengindahkan titah yang baik dan suruh yang ma'ruf, yang diperoleh dalam kerapatan- kerapatan adat nagari yang bersidang menyangkut adat istiadat dalam nagari baik bidang helat nikah kawin, bidang mendirikan rumah gadang, maupun bidang adat sehari- hari dan sebagainya.³³

5. Mamak pai tampak punggung pulang tampak muka.

Artinya : Mamak kandung atau tungganai rumah atau mamak kepala waris yang hendak pergi merantau tidak lupa memberitahukan kemenakan-kemenakannya dan seandainya terjadi masalah di kalangan kemenakan yang ditinggalkannya, akan diselesaikan oleh wakilnya.³⁴

Dari uraian tentang tugas dan kewajiban mamak dan kemenakan dalam rangka tertib bermamak- kemenakan di atas, maka jelaslah bahwa "tali kerabat mamak kemenakan merupakan tali kerabat yang ditumbuhkan bagi keperluan kesinambungan dan kestabilan kepemimpinan di lingkungan sosial, sejak dari rumah, kampung sampai ke nagari.

Bimbingan yang diminta dan dituntut pada seorang laki- laki yang berkenaan dengan fungsinya sebagai mamak dalam membimbing lingkungan

³² N. M. Rangkoto, *ibid.* hal. 16.

³³ N. M. Rangkoto, *ibid.* hal. 17

³⁴ N. M. Rangkoto, *ibid.* hal. 18.

masyarakat yang dipimpinnya itu pada pokoknya terdiri dari 2 (dua) sasaran, yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap kemenakannya yang perempuan, bimbingan itu meliputi persiapan untuk menyambut warih bajawek (waris berjawat) dan persiapan untuk melanjutkan keturunan. Warih bajawek disini ialah pemahaman nilai- nilai lingkungan sosial yang menempatkan perempuan sebagai pusek jalo pumpunan ikan (pusat jala pumpunan ikan), yang artinya mereka merupakan titik pusat lingkungan masyarakatnya di rumah dengan peran sebagai nenek dan ibu yang akan mengasuh anak cucunya dan sebagai istri yang menjadi tali penghubung dengan lingkungan masyarakat lain.
2. Terhadap kemenakannya yang laki- laki, bimbingan itu meliputi persiapan untuk pusako batolong (pusaka bertolong) yang maksudnya ialah untuk berperan sebagai penunjang dan pengembangan sumber- sumber kehidupan sanak saudaranya, terutama sanak saudara perempunnya yang akan melanjutkan keturunan mereka.

Berdasarkan uraian di atas tentang tugas dan kewajiban seorang mamak kandung terhadap kemenakan bertali darah, maka jelaslah tugasnya seperti tugas seorang ayah pada masyarakat di luar Minagkabau. Namun letak perbedaannya, mamak akan berhadapan dengan lebih banyak kemenakan jika mamak itu mempunyai banyak saudara perempuan. Sedangkan seorang ayah hanya akan berhadapan dengan anak- anaknya saja. Akan tetapi, tugas mamak ada kalanya

jauh lebih ringan apabila dia mempunyai banyak saudara laki- laki yang menjadi mamak terhadap anak- anak saudara perempuan mereka.

Tugas dan kewajiban mamak, pertama- tama ialah mengusahakan rumah buat kemenakan- kemenakannya. Apabila rumah gadang telah sempit, mamak mencari tempat yang baru atau memperbesar rumah yang lama dan menjaga rumah gadang tetap dalam keadaan baik dengan memperbaiki bagian- bagian dari rumah yang rusak.

Setelah menyelenggarakan perumahan bagi kemenakan- kemenakannya, maka kewajiban lain dari mamak terhadap anggota paruihnya baik yang telah kawin maupun yang belum kawin ialah menyempurnakan kebutuhan hidup mereka sebaik- baiknya terutama makanan, pakaian serta pendidikan kemenakan- kemenakannya.

Selain dari itu apabila kemenakan- kemenakannya berada dalam kesulitan, mamak menolong memberi jalan mengatasi kesukaran- kesukaran tersebut, memberi nasehat serta petunjuk- petunjuk kepada kemenakan- kemenakannya. Seperti kata pepatah adat yang berbunyi : “pai tampek batanyo, pulang tampek babarito, artinya mamak merupakan penasihat dan tempat berberita dari segala yang dilakukan kemenakannya.³⁵

Terhadap kemenakan- kemenakannya yang perempuan, mamak mencarikan jodohnya tepat pada waktunya. Setelah ada persesuaian dengan segenap anggota keluarga dengan mamak, maka diputuskan siapakah yang akan

³⁵ Chairul Anwar, op. cit. hal. 86.

diambil sebagai urang sumando. Dan dalam hal menentukan pasangan hidup bagi kemenakannya ini, mamak mempunyai hak membuang kemenakannya dari lingkungan keluarga (buang adat) dengan memberitahukan dan persetujuan penghulu andiko di dalam nagari, apabila kemenakan kawin tanpa seizin mamaknya.

Sebagai imbangannya dari kewajiban mamak memelihara kemenakan, maka sebaliknya kemenakan juga harus menjaga mamaknya, sehingga antara mamak dengan kemenakannya terdapat adat, tanggung menanggung. Kemenakan harus menolong kalau mamak didalam kesukaran dan kalau mamak dihina orang lain, kemenakanlah yang menuntut balas Kalau mamak datang ke rumah kemenakan lekas- lekas dihidangkan santapan dan minuman, kalau hilang kemenakan mencari, sakit dia dicarikan kemenakannya obat dan kalau meninggal kemenakan- kemenakanlah menanam.³⁶

Dengan demikian maka jelaslah bahwa peranan dan tanggung jawab laki-laki Minangkabau sebagai mamak sangat besar terhadap kemenakan-kemenakannya dan nagarinya. Serta adanya hubungan timbal balik antara mamak dan kemenakan, sehingga menimbulkan tertib bermamak- berkemenakan dalam masyarakat Minangkabau yang berdasarkan sistem Matrilineal

³⁶ Chairul Anwar, *ibid.* hal. 86-87.

D. Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Minangkabau.

Manusia dalam perjalanan hidupnya akan melalui masa- masa tertentu, dimulai dari masa balita, masa kanak- kanak, masa remaja, masa pancaroba, masa perkawinan, masa berkeluarga, masa usia senja dan masa tua.

Setiap peralihan dari satu masa berikutnya mempunyai arti tersendiri dalam kehidupan setiap manusia. Salah satu masa peralihan yang sangat penting adalah pada saat menginjak masa perkawinan, karena masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari masa- masa sebelumnya dan mulai membentuk kelompok kecil (keluarga) miliknya sendiri yang tidak lepas dari kelompok hidupnya semula. Dengan perkataan lain perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok.

Dalam hukum adat perkawinan, bukanlah hanya masalah pribadi- pribadi yang melakukan perkawinan tersebut, melainkan juga termasuk masalah keluarga- keluarga yang bersangkutan, mulai dari mencari pasangan, pertunangan dan perkawinan bahkan sampai pada akibat- akibat dari perkawinan tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan dalam hukum adat bukan hanya menyangkut masalah bagi pengantin laki- laki dan perempuan saja tetapi juga masalah keluarga dari kedua pihak dan sistem masyarakatnya yang berlaku.

Sistem masyarakat hukum adat disusun berdasarkan 2 (dua) faktor, yaitu faktor genealogis (keturunan) dan faktor teritorial (lingkungan). Faktor genealogis (keturunan) inilah yang mempengaruhi sistem perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat, seperti misalnya :

- a. Pada masyarakat Batak yang menganut prinsip garis keturunan Patrilineal, bentuk perkawinan yang dikenal adalah perkawinan jujur, dengan ciri- cirinya yaitu tempat kediaman suami istri bersifat patrilokal yang artinya istri wajib mengikuti tempat kediaman suami atau keluarga suami.
- b. Pada masyarakat Minangkabau yang menganut prinsip garis keturunan Matrilineal, bentuk perkawinan yang dikenal adalah perkawinan semendo, dengan ciri- cirinya yaitu tempat kediaman suami istri bersifat matrilokal yang artinya istri tidak wajib mengikuti tempat kediaman suami atau keluarga suami.
- c. Pada masyarakat Jawa, yang menganut prinsip garis keturunan Bilateral, bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan bebas, tidak terikat pada tempat kediaman keluarga suami atau keluarga istri karena suami dan istri bebas menentukan tempat kediaman bersama.

Sesuai dengan sistem masyarakat yang berlaku di Indonesia, maka dikenal ada 3 (tiga) sifat sistem perkawinan yang berlaku, yaitu :

1. Eksogami, artinya sistem perkawinan dimana seseorang harus kawin dengan anggota klan yang lain.

2. Endogami, artinya sistem perkawinan dimana seseorang harus kawin dengan anggota satu klan.
3. Eleutherogami, artinya sistem perkawinan dimana seseorang bebas menentukan pasangannya, karena tidak mengenal adanya pembagian klan.³⁷

Sistem perkawinan yang bersifat Eksogami dijumpai pada masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan Patrilineal dan Materilineal, sedangkan pada masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan Bilateral tidak terdapat sistem perkawinan yang bersifat eksogami, karena tidak terdapat klan.

Akan tetapi dalam pelaksanaan perkawinan yang eksogami, ada perbedaannya dalam lingkungan masyarakat Patrilineal dengan dalam lingkungan masyarakat Matrilineal, yaitu dalam lingkungan masyarakat Patrilineal istri menjadi tanggungan suaminya dan keluarga suaminya, berhak dan berkewajiban di situ dan dilepaskan oleh keluarganya, sedangkan dalam lingkungan masyarakat Matrilineal seorang suami hanya semata-mata sebagai seorang yang datang bertamu yang datang menetap pada malam hari di rumah istrinya dan kembali ke rumah orang tuanya pada pagi harinya, si suamipun tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, terhadap harta benda milik istrinya dan terhadap hal-hal yang bersangkutan paut dengan rumah tangganya.

Pada masyarakat Patrilineal yang menganut sistem perkawinan eksogami melahirkan bentuk perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan dimana keluarga pihak penganten laki-laki wajib memberikan barang jujur (disebut

³⁷ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1977, hal. 35.

sinamot, boli, tuhor atau belis) kepada keluarga pihak penganten perempuan, sebagai tanda bahwa penganten perempuan akan keluar dari keluarganya dan masuk ke dalam keluarga penganten laki-laki. Hal ini terjadi karena asal mulanya berkaitan dengan hal yang bersifat magis berdasarkan suatu macam kepercayaan bahwa manusia hidup dalam alam yang dipengaruhi oleh hal-hal yang gaib yang berada di luar kekuasaannya.

Menurut kepercayaan itu hidup manusia tenang dan tenteram apabila semua tenaga gaib di sekitarnya itu berada dalam keadaan seimbang. Sehingga apabila keseimbangan itu terganggu, misalnya dengan keluarnya penganten perempuan dari keluarganya maka dibutuhkan pemulihan keseimbangan keadaan tersebut melalui pemberian barang-barang magis kepada keluarga tersebut.³⁸

Pada masyarakat Materilineal yang menganut sistem perkawinan eksogami, melahirkan bentuk perkawinan semendo, suami dan istri tidak lebur menjadi satu keluarga, akan tetapi masing-masing tetap menjadi anggota keluarganya semula. Suami tetap tinggal di rumah orang tuanya, hanya pada malam hari datang menetap di rumah istrinya dan pada pagi harinya kembali ke rumah ibunya.

Selain berlaku pada masyarakat Matrilineal, perkawinan semendo kadang-kadang dijumpai pada masyarakat patrilineal dan masyarakat bilateral, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan semendo merupakan bentuk perkawinan yang

³⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 21.

umum, hanya saja akibat dari perkawinan itu ditentukan oleh sistem kekeluargaan dimana perkawinan semendo itu dilakukan.

Sebagai contoh pada masyarakat Rejang, berlaku bentuk perkawinan semendo selain berbentuk perkawinan jujur. Perkawinan semendo yang dikenal ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Kawin semendo tak beradat, adalah perkawinan dimana pihak laki- laki sama sekali tidak membayar uang adat. Dan semua anak menarik garis keturunan melalui ibunya dan masuk klan ibunya.
2. Kawin semendo beradat terdiri dari 3 (tiga) golongan, yang berdasarkan besar kecilnya uang adat yang diberikan, yaitu :
 - a. Kawin semendo penuh beradat, adalah perkawinan dengan jumlah uang adat yang ditentukan adat. Disini anak- anak dibagi dua dalam menarik garis keturunan dari ayahnya dan dari ibunya.
 - b. Kawin semendo setengah beradat, adalah perkawinan dengan jumlah uang adat setengah dari yang telah ditentukan. Disini semua anak-anak menarik garis keturunan dari ibunya, kecuali seorang anak yang dijamin bagi ayahnya.
 - c. Kawin semendo kurang beradat adalah perkawinan dengan jumlah uang adat yang kurang dari minimal. Disini semua anak menarik garis keturunan dari ibunya, tetapi kepada si ayah diberikan hak untuk mendapatkan seorang anak dengan membayar uang pedaut.

3. Kawin semendo rajo- rajo adalah perkawinan dikalangan bangsawan untuk menjaga keturunan, kekayaan serta martabatnya. Disini anak- anak menarik garis keturunan serentak melalui ayah dan ibunya.³⁹

Selain itu perkawinan semendo ini juga dilakukan pada masyarakat Bali dan masyarakat Lampung, dalam hubungannya dengan sistem kewarisan mayorat yang berlaku. Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki- laki melainkan anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut akan melakukan perkawinan semendo sehingga dia berhak menjadi ahli waris dari keluarganya dan dia dapat menjadi penghubung menarik garis keturunan bagi anak- anaknya.

Sistem perkawinan yang bersifat Eleutherogami merupakan perkawinan yang bebas menentukan pasangannya, karena tidak mengenal adanya pembagian klan atau kasta. Sistem perkawinan ini terdapat antara lain pada masyarakat Jawa.

D. 1. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Minangkabau.

Sistem perkawinan pada masyarakat Minangkabau bersifat Eksogami, yaitu suatu sistem perkawinan dimana orang harus kawin dengan anggota klan yang lain atau dengan kata lain seseorang tidak boleh kawin dengan anggota seklan.

Sistem perkawinan yang bersifat eksogami pada masyarakat Minangkabau menghasilkan bentuk perkawinan semendo. Kedua belah pihak

³⁹ Bushar Muhammad, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 23- 24.

atau salah satu pihak yang menikah itu tidak lebur kedalam kaum kerabat pasangannya, karena berdasarkan struktur masyarakat Minangkabau setiap orang adalah warga kaumnya masing- masing, walaupun telah diikat oleh perkawinan tersebut.⁴⁰

Anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut menjadi anggota kaum ibunya, sehingga siayah tidak perlu bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya dan kehidupan rumah tangga.

Akibat dari bentuk perkawinan semendo, sangat mempengaruhi hal- hal sebagai berikut :

1. Kedudukan suami istri.
2. Hubungan anak dengan orang tua.
3. Harta perkawinan.

Ad. 1. Kedudukan suami istri dalam ikatan perkawinan.

Dalam ikatan perkawinan, si istri sendiri tidak meleburkan diri ke dalam ikatan tersebut. Dia tetap bebas dengan memiliki harta dan hak- hak yang lepas dari harta dan hak- hak suaminya, karena secara hukum dia adalah bagian dari keluarga ibunya bukan suaminya.

Bentuk perkawinan semendo ini tidak menciptakan keluarga inti (nuclear family) yang baru, sebab suami atau istri masing- masing tetap menjadi anggota dari garis keturunan mereka masing- masing.

⁴⁰ A. A. Navis, op. cit. hal. 193

Pembentukan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak- anak tidak terdapat dalam struktur masyarakat Minangkabau, karena masyarakat Minangkabau menganut prinsip garis keturunan Matrilineal, dimana ayah dan anak- anaknya bukan merupakan satu keluarga, dia hanya dianggap sebagai tamu dalam keluarga yang tujuannya untuk memberikan keturunan bagi kerabat istrinya. Tempatnya yang sah adalah dalam garis keturunan ibunya, dimana dia adalah wali dari garis keturunannya dan pelindung atas harta benda kaumnya itu, walaupun ia harus menahan dirinya dari menikmati hasil tanah kaumnya karena dia tidak dapat menuntut bagian apa- apa untuk dirinya.

Sebagai tamu atau urang sumando di rumah istrinya, pada hakatnya dia tidak dibebani dengan tanggung jawab apapun dan tidak mempunyai kekuasaan penuh terhadap istri dan anak- anaknya. Segala kebutuhan hidup bagi istri dan anak- anaknya diberikan oleh keluarga istrinya, namun hati nuraninya dan persaan takut dipandang rendah oleh masyarakat sekelilingnya mendorong dia memberi nafkah kepada istrinya.

Ikatan yang lemah antara suami dan istri dan anak- anaknya ini, akan lebih jelas terlihat apabila si laki- laki berpoligami sehingga lebih jarang bertemu dengan anak- anaknya karena harus bergilir mengujungi istri- istrinya. Dan ikatan ini tambah berkurang lagi apabila terjadi perceraian, sehingga dia akan lebih jarang lagi bertemu dengan anak- anaknya.

Ad. 2. Hubungan orang tua dengan anak.

Dalam bentuk perkawinan semendo, anak- anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut menarik garis keturunan dari ibunya, bukan dari ayahnya. Anak- anak akan mewaris harta ibunya dan keluarga ibunya, bukan dari ayahnya dan keluarga ayahnya.

Dengan bentuk perkawinan semendo ini, anak- anak hanya bertemu dengan ayahnya pada malam hari. Mereka lebih dekat dengan mamaknya yang memegang peranan seperti peranan seorang ayah pada masyarakat di luar Minangkabau.

Ad. 3. Harta perkawinan.

Dalam bentuk perkawinan semendo, tidak mungkin adanya harta bersama, yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan yang menjadi milik bersama antara suami dan istri tersebut. Karena perkawinan semendo tidak memenuhi syarat- syarat tertentu adanya harta bersama. Syarat- syarat harta bersama, antara lain diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya hidup bersama atau hidup berkeluarga, dimana ayah dan ibu serta anak- anak hidup bersama rukun dan mesra satu sama lain dalam satu lingkungan rumah tangga yang berdiri sendiri, terutama dalam hal mempunyai pendapatan sendiri.
2. Adanya hidup kesederajatan antara suami dan istri, yaitu derajat yang sama menurut hukum adat dengan ukuran.
 - a. Menurut ukuran ekonomi atau kekayaan.

- b. Menurut ukuran darah atau keturunan.
- 3. Adanya hubungan baik antara suami dan istri serta antara keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.

Demikian pula halnya dengan jerih payah suami atau ayah tidak diperuntukan bagi istri dan anak-anaknya, melainkan bagi saudara-saudaranya yang perempuan serta kemenakan-kemenakannya, yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai mamak dan keluaraganya.

Uraian tentang bentuk perkawinan semendo di atas, adalah bentuk asli dari perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau yang didasarkan pada sistem Matrilineal. Bentuk perkawinan ini oleh Hazairin dinamakan perkawinan bertandang.

D. 2. Perkawinan Yang Ideal Bagi Orang Minangkabau.

Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dengan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai “pulang ke mamak” atau “pulang ke bako”. Pulang ke mamak berarti pria mengawini anak perempuan mamaknya, sedangkan “pulang ke bako” ialah pria mengawini kemenakan perempuan ayahnya. Tingkat perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan “ambil mengambil”, artinya, kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Urutan selanjutnya ialah perkawinan orang sekorong, sekampung, senagari, seluhak dan

akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai meskipun tidak dilarang.

Dengan perkataan lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara “awak samo awak” (kita sama kita). Itu bukan menggambarkan bahwa mereka menganut sikap yang eksklusif. Pola perkawinan “awak samo awak” itu berlatar belakang sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya. Sistem yang dianut mereka ini barulah akan utuh apabila dicampuri oleh orang luar. Dalam pola perkawinan eksogami yang menjadi ikatan suami istri begitu semu itu perlulah modus agar lembaga perkawinan tidak menjadi rapuh. Modus itu ialah perkawinan “awak samo awak”. Tambah dekat hubungan awaknya (kitanya), tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu.⁴¹

Struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal yaitu dengan sistem kehidupan yang komunal, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga saja. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak lepas dari masalah bersama.⁴²

⁴¹ A. A. Navis, Ibid. hal. 194.

⁴² A. A. Navis, Ibid, hal. 193.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat Minangkabau berlaku sistem Matrilineal, yaitu tersusun atas dasar garis keturunan ibu. Mereka hidup dalam satu kekerabatan yang dihitung menurut garis ibu semata-mata dan pusaka serta waris di turunkan menurut garis ibu pula. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga ibunya, dan tidak dari ayah.

Dalam masyarakat yang menganut bentuk kekerabatan Matrilineal, perkawinan yang sesuai dengan sistem itu ialah dengan cara mendatangkan laki-laki dari luar lingkungan untuk maksud menghasilkan keturunan yang akan memperkembangkan anggota kelompok itu. Perkawinan seperti ini disebut “kawin semendo”. Suami yang datang itu disebut “urang sumando”. Si suami tetap menjadi anggota kelompok ibunya. Untuk maksud pengembangan keluarga itu, yang diperlukan hanya bapak biologis, bukan bapak sosial. Dengan demikian status sosial dari ayah tidak diperhitungkan. Walaupun sering terjadi penjemputan suami yang martabat baik, bukan berarti akan menghubungkan si anak kepada ayahnya, tetapi hanya sekedar mendapatkan bibit baik.⁴³

Menurut struktur masyarakat Minangkabau setiap orang adalah warga kaum dan sukunya, walaupun sudah melakukan perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan menjadi anggota kaum si istri, bukan si ayah. Si suami tidak memegang kuasa atas anak dan istrinya. Dengan diam di rumah istrinya si suami bukan menjual badannya kepada keluarga istrinya, sebab ia tetap menjadi anggota

⁴³ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 185.

kaum dan sukunya. Hanya dapat dikatakan bahwa ia sudah tergadai kepada keluarga pihak istrinya yang memandangnya sebagai seorang semenda atau “urang sumando”. Sumado berasal dari kata sando atau gadai. Dengan mengadaikan dirinya kepada keluarga istrinya, laki-laki itu tidak hilang kemerdekaannya. Pihak keluarga si istri hendaklah pandai memelihara hati “urang sumando” tersebut, jangan tersinggung hatinya. Dengan demikian akan bertambah sayangnya kepada anak dan istrinya. Begitulah adat orang “ba Sumando”. Menurut adat Minangkabau Urang Sumando itu banyak gunanya antara lain:

1. Urang sumando itu merupakan bibit yang baik, akan menjadikan ramai dan berseri-seri kampung halaman.
2. Urang sumando akan menjadi tempat kepercayaan dalam rumah tangga.
3. Urang sumando itu akan menjadi pagaran yang teguh untuk menjaga kampung halaman, penolong niniak mamak.
4. Kalau ia orang cerdik pandai akan jadi guru oleh kita dan anak kemenakan.
5. Kalau ia orang kaya, akan dapat melapangkan kita dan anak kemenakan kita dalam kesempitan.
6. Dan lain-lain.

Peranan “urang sumando” yang utama di rumah istrinya ialah untuk menghasilkan keturunan yang akan menambah jumlah anggota kelompok

matrilineal istrinya dan tidak akan menambah jumlah anggota kelompoknya sendiri.⁴⁴

Setelah masuknya agama Islam, banyak orang pergi marantau keluar dari daerah yang masyarakat Matrilineal (seperti Jawa), bertambah banyaknya orang Minang berpendidikan tinggi serta keluarnya Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka terjadilah perubahan terhadap nilai- nilai Matrilineal tersebut. Hal ini terbukti dengan berubahnya dari semendo bertandang menjadi semendo menetap. Maksud dari semendo menetap ini ialah suami menjadi kepala keluarga ia (suami) turut bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anaknya. Hal ini tergambar bahwa perkembangan tersebut menjurus ke Nuclear family (keluarga inti).

⁴⁴ Amir Syarifudin, *ibid.* hal. 184.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi atau ilmu tentang metode, mempunyai arti suatu studi dan sistematis tentang prinsip- prinsip yang akan mengarah penelitian, dengan demikian metodologi dimaksud sebagai suatu prinsip dasar berhasilnya penelitian yang merupakan suatu sistem atau cara untuk memperoleh data- data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan suatu kesimpulan akhir dalam memecahkan masalah tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, Metode adalah proses, prinsip- prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati- hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip- prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴⁵

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya, namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berfikir menurut sejarahnya yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press. Jakarta, 1984, hal. 6.

memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁴⁶

A. Metoda Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

- a. yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau secara hukum.
- b. empiris berasal dari Bahasa Inggris dimaksudkan adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum khususnya hukum adat yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dari tesis ini merupakan penelitian studi yang menguraikan secara deskriptif analitis/melihat gambaran atau fakta- fakta yang ada di lapangan, yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

C. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

⁴⁶ Rony Hanintjo Sioemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 36.

1. Data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (in-depth) interview dan pengamatan (observasi) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan mamak rumah dan warga masyarakat Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman yang menyangkut perkembangan peranan mamak dalam perkawinan bajapuik.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari ;
 - b. Bahan hukum primer yang merupakan bahan- bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu ;
 1. Undang- undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan.
 2. Kompilasi Hukum Islam.
 3. Undang- undang nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tetang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 63 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 09 tahun 2000, tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 02 tahun 2002, tentang Pemerintahan Nagari.

c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan- bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu ;

1. Buku- buku ilmiah.
2. Makalah- makalah.
3. Hasil- hasil penelitian.

D. Penentuan Populasi dan Sampel

D.1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Yang mana pada Nagari Sintuk tersebut terdiri dari 4 (empat) suku, yaitu ;

1. Suku Sikumbang
2. Suku Koto
3. Suku Panyalaian
4. Suku Jambak

D. 2. Sampel

Dalam pengambilan sampel ditentukan melalui purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan

pada tujuan tertentu.⁴⁷ Pengambilan sampel dengan tujuan untuk melihat persyaratan dan ciri- ciri tertentu dari objek yang akan diteliti, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak bisa mengambil sampel dalam jumlah yang besar.

Dari 4 (empat) suku yang ada di Nagari Sintuk tersebut penulis hanya mengambil 2 (dua) suku saja yaitu ;

1. Suku Sikumbang
2. Suku Koto

Mengingat banyaknya mamak yang ada di dalam suku tersebut, maka diadakan juga pemilihan secara purposive sampling, dengan menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur- unsur dari sampel yaitu mereka yang tergolong dalam mamak rumah atau tungganai rumah karena mamak rumah inilah yang punya peranan yang besar dalam masalah perkawinan anak kemenakannya. Dari dua suku tersebut penulis mengambil sampel masing-masing 5 (lima) orang mamak rumah pada setiap suku yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah diperoleh dari hasil wawancara dengan mamak rumah pada Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid. hal. 51.

dari berbagai dokumen- dokumen yang tersedia di perpustakaan baik dari perseorangan maupun instansi pemerintah.

Agar terarahnya data primer yang akan dikumpulkan, digunakan teknik wawancara mendalam (in-depth) interview yang terstruktur, untuk menggali sebanyak- banyaknya informasi yang ingin diperoleh dari interviewee yang dalam penelitian ini dijadikan nara sumber atau alat/instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam kegiatan ini adalah daftar wawancara yang terstruktur.

F. Teknik Analisis

Setelah data terkumpul dari penelitian yang dilakukan maka terhadap semua data tersebut dilakukan hal- hal sebagai berikut ;

- a. Editing data, yaitu mengedit atau memeriksa data- data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.
- b. Pengolahan data yaitu data- data yang telah diedit telah dikelompokkan dan disusun dengan kategori yang telah dibuat.
- c. Data dikelompokkan dalam komponen yang telah disesuaikan dengan masalah- masalah dan tujuan penelitian.

Semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Dengan memperhatikan pendapat pakar yang penulis kutip maka hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Setelah dilakukan penelitian di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman tentang perubahan peranan mamak dalam perkawinan bajapuik pada masyarakat Hukum Adat Minangkabau maka dapat disajikan data- data sebagai berikut ;

A. 1. Gambaran Umum Nagari Sintuak

Memberikan gambaran secara umum tentang Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Melalui gambaran secara umum memberikan data tentang lokasi penelitian karena lokasi penelitian adalah merupakan sumber data dari permasalahan yang akan dicari jawabannya. Dalam gambaran secara umum Nagari Sintuak ini akan dibahas adalah sejarah pembentukan Nagari Sintuak, Letak geografis, Demografis, Agama, Pendidikan dan Mata Pencarian masyarakat Nagari Sintuak.

A. 1. 1. Sejarah Pembentukan Nagari Sintuak

Sumatera Barat adalah satu- satunya propinsi di Indonesia yang memakai sistem pemerintahan berbentuk Nagari, dimana Nagari merupakan daerah otonom yang dalam pemerintahannya diatur oleh lembaga yang disebut tigo tungku

sajaringan (tiga tungku sajarangan) yang terdiri dari Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai. Aturan yang mengatur kehidupan bernagari tersebut adalah hukum adat yang telah membudaya dalam masyarakat Minangkabau yang memberikan kepada agama yang dianutnya khususnya agama Islam yang dalam pepatah Minangkabau disebut adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah artinya adat tersebut bersumberkan kepada agama dan agama bersumberkan kepada Alquran.

Pemerintahan Nagari ini berlaku pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau sejak terbentuknya persekutuan- persekutuan hidup pada masyarakat sehingga membentuk suatu Koto. Menurut Amir MS, Koto adalah mereka merasa lebih kuat dan berani turun dari puncak- puncak bukit dan mendirikan tempat- tempat pemukiman di kaki bukit atau di daerah landai yang banyak terdapat air dan berdirilah perkampungan.⁴⁸

Karena menurut sejarahnya orang Minangkabau berasal dari gunung merapi, hal tersebut dapat dilihat dari fatwa adat melalui pantun terkenal ;⁴⁹

Dima (no) titiak palito

Dibaliak telong nan batali

Dari mano turun niniak kito

Dari puncak gunung merapi

⁴⁸ Amir MS. *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, PT. Mutiara Sumberwijaya, Jakarta, 2001, hal. 47.

⁴⁹ LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Bandi Kitabullah Pedoman Hidup Bernagari*, Sako Batuah, Padang, 2002, hal. 7-8.

Artinya dimana titik pelita (titik api) dibalik telong nan batali yaitu dibalik lampu minyak yang diberi tali, dari mana turun nenek moyang kita, dari puncak gunung merapi.

Dengan keluarnya Undang- Undang nomor 5 tahun 1979, tentang pemerintahan desa sehingga pemerintahan Nagari diganti dengan pemerintahan desa. Hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Apabila pemerintahan nagari tidak diganti dengan pemerintahan desa maka tidak mendapat dana bantuan desa dari pemerintah pusat.

Hal ini menyebabkan kedudukan niniak mamak, alim ulama dan cerdik pandai yang tergabung dalam kerapatan adat nagari di Sumatera Barat tidak mendapat tempat dalam pemerintahan desa.

Dengan berlakunya pemerintahan desa mengakibatkan para generasi muda sekarang tidak lagi mengetahui tata krama hidup yang bersandarkan pada Syarak dan Kitabullah.⁵⁰ Dampak negatif hapusnya pemerintahan nagari bagi masyarakat Sumatera Barat adalah ;

1. Jati diri masyarakat Sumatera Barat mengalami erosi. Pemahaman dan penghayatan falsafah adat Minangkabau Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang manjadi guru mengalami degradasi.

⁵⁰ Wawancara Penulis Dengan Wali Nagari Sintuak.

2. Anak Nagari tidak lagi mempunyai kewenangan politis. Hubungan erat yang pernah terjalin antara pemerintah dengan anak nagari dan masyarakat adat menjadi berkurang, bahkan hilang.
3. Hilangnya batas- batas nagari. Wilayah nagari terpecah- pecah. Pembentukan dan pemekaran desa menyebabkan hilangnya salah satu syarat adanya wilayah suatu nagari. Syarat suatu nagari, basosok bajurami yang artinya mempunyai daerah (wilayah) dengan batas- batas yang jelas. Enam syarat lainnya adalah bapandam pakuburan, balabuah batapian, bakorong bakampuang, barumah batanggo, basawah baladang, babalai bamusajik.
4. Masyarakat kehilangan tokoh Angku Palo, sebutan anak nagari untuk wali/kepala nagari. Fungsinya tidak dapat digantikan oleh kepala desa atau lurah. Angku Palo adalah tokoh karismatik yang amat dihormati yang menjadi teladan dan panutan anak nagari. Angko Palo tidak hanya menguasai dan memahami seluk beluk pemerintahan nagari tetapi juga menguasai dan memahami adat istiadat anak nagari serta taat beragama. Sekarang kebanyakan diantara kepala desa/lurah merupakan orang- orang muda yang kurang memahami adat istiadat setempat. Bahkan ada diantara mereka bukan berasal dari desa setempat.
5. Sistem sentratistik yang diterapkan selama pemerintahan orde baru sangat mengurangi nilai- nilai luhur yang diwarisi sejak lama seperti gotong royong dan sistem demokratis.

6. Aspirasi anak nagari dalam pembangunan kehilangan wadah aslinya yaitu nagari desa/kelurahan dan bahkan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah nomor 13 tahun 1983 tidak mampu menggantikan fungsi nagari tersebut.
7. Generasi muda Minang sekarang sudah banyak yang tidak mengetahui dan memahami apa itu nagari terutama bagi mereka yang tidak sempat mengikuti mata pelajaran BAM (Budaya Alam Minangkabau) dalam kurikulum tahun 1994, dan terutama mereka yang tinggal di kota.
8. Tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin terpinggirkan dan kehilangan fungsinya.⁵¹

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah pada tanggal 4 Mei tahun 1999, memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk sistem pemerintahannya. Jadi daerah mempunyai otonomi untuk membentuk sistem pemerintahan daerah yang diinginkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 adalah embrio kembalinya sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan sebutan bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 63 tahun 1999 pasal 9 ayat 1 juga menyatakan bahwa Sebutan untuk desa, kepala desa, badan perwakilan desa dan

⁵¹ LKAAM, Ibid. hal. 31-32.

perangkat desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal ini memberikan kebebasan kepada daerah untuk sebutan wilayah desa yang oleh masyarakat Minangkabau di jadikan Nagari. Untuk Sumatera Barat telah diberlakukan pemerintahan nagari sebelum dibentuknya pemerintahan desa. Dalam pepatah Minangkabau menyatakan kembalikan dulu siriah ka gagangnyo, pulangkan dulu pinang katampuaknyo atau kembalikan dulu sirih kegagangnya, pulangkan dulu pinang ketampuknya artinya masyarakat Minangkabau kembali lagi ke pemerintahan Nagari.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2000, tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari maka untuk Sumatera Barat resmi pemerintahannya berbentuk Nagari, sedangkan untuk daerah Kabupaten Padang Pariaman diatur oleh Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2002 tentang pemerintahan Nagari, yang mulai berlaku tanggal 8 Maret 2002.

Wilayah Nagari lebih luas dari pada desa, sebuah nagari minimal mempunyai 4 (empat) suku. Nagari Sintuak terdapat 4 (empat) suku yaitu suku Sikumbang, Suku Koto, Suku Panyalaian dan Suku Jambak serta merupakan gabungan dari 5 (lima) desa yaitu desa Tapakis, desa Sintuak Barat, desa Sintuak Timur, desa Sintuak Selatan dan desa Sintuak Utara.

A. 1. 2. Letak Geografis

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman Nagari Sintuak terletak pada Kabupaten Padang Pariaman. Merupakan kabupaten yang terletak pada daerah pesisir pantai barat Sumatera Barat. Terletak antara 0,11'' - 3,30'' Lintang Selatan dan 98,36'' - 100,40'' bujur timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar 1.402,15 Km', dengan panjang garis pantai 72,50 km'. Luas daerah ini setara dengan 3,32 persen dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 1 (satu) kabupaten dan 43 kecamatan. Nagari Sintuak terletak pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang terdiri dari dua nagari yaitu Nagari Toboh Gadang dan Nagari Sintuak. Nagari Sintuak merupakan gabungan dari 5 (lima) desa yaitu desa Batang Tapakis, desa Sintuak Barat, desa Sintuak Timur, desa Sintuak Selatan dan desa Sintuak Utara. Dalam nagari Sintuak terdapat pula 4 (empat) suku yaitu suku Sikumbang, suku Koto, suku Panyalaian dan suku Jambak.

Nagari Sintuak merupakan daerah dataran dengan ketinggian dari permukaan laut 12 meter, memiliki jumlah penduduk 8.242 jiwa dengan luas wilayah nagari 1.119 hektar. Dilihat dari batas- batasnya maka sebelah utara dengan Kecamatan Enam Lingkung, sebelah selatan dengan Kecamatan Lubuk Alung, sebelah timur dengan Kecamatan Lubuk Alung dan sebelah Barat dengan Nagari Toboh Gadang.

A. 1. 3. Demografi

Sebagaimana umumnya orang Minangkabau yang suka merantau atau hidup di Negeri orang begitu juga dengan penduduk Nagari Sintuk. Karena budaya merantau tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi warga Nagari Sintuk.

Seperti kata pepatah setinggi bangau terbang baliknya kekubangnan jua, sejauh jauh orang merantau baliknya kekampung halaman juga, artinya sejauh-jauh orang Minang merantau nantinya pasti akan kembali ke kampung halaman juga. Ini melambangkan betapa cintanya orang nagari Sintuk kepada kampung halaman.

Karena penduduk Nagari Sintuk banyak yang pergi ke Negeri orang sehingga rumah- rumah banyak yang ditinggalkan begitu saja. Berdasarkan sumber data Biro Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2002, jumlah penduduknya 8.242 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki- laki 4.104 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 4. 138 jiwa dengan 1.760 kepala keluarga.

A. 1. 4. Agama

Propinsi Sumatera Barat yang di kanal dengan Minangkabau adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia yang mempunyai tatanan kehidupan masyarakat yang berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak bansandi kitabullah artinya masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang Islami.

Adat yang Islami telah mengantarkan masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Sintuak menjadi masyarakat yang kokoh, aman, damai dan sentosa yang terhimpun dalam kesatuan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2002 terlihat dari semua penduduk Nagari Sintuak beragama Islam, yang taat menjalankan ibadah keagamaan. Keadaan tersebut terlihat dari semangat penduduk dalam mendirikan Musholla dengan cara bergotong royong dengan melibatkan seluruh warga baik laki-laki maupun perempuan termasuk juga anak-anak. Banyaknya Musholla yang berdiri sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dan masjid sebanyak 4 (empat) buah.

Aktifitas penduduk dalam kegiatan keagamaan sangat menonjol. Para bapak yang dalam kesehariannya sering memakai sarung dan peci serta para wanitanya banyak yang memakai kerudung serta sering melakukan pengajian. Sedangkan pemudanya banyak yang aktif di kegiatan remaja Masjid.

A. 1. 5. Pendidikan

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa warga nagari Sintuak adalah warga yang suka merantau baik itu dengan tujuan ekonomi maupun tujuan pendidikan. Dari segi pendidikan banyak juga warga nagari Sintuak merantau untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pada umumnya banyak yang melanjutkan pendidikan ke kota Padang dan pulau Jawa yang menurut mereka adalah tempat yang berkualitas untuk pendidikan.

Setelah mereka selesai pendidikan tidak mau lagi balik ke kampung halaman dan mencari pekerjaan di negeri orang karena mereka lebih bangga hidup di negeri orang dari pada di kampung halaman sendiri. Sikap demikian mereka pertahankan terus sampai mereka berhasil hidup di rantau. Kalau mereka belum berhasil maka tidak mau balik ke kampung halaman karena merasa malu kenapa mereka tidak bisa sukses hidup di rantau.

Sikap demikian bukan berarti orang nagari Sintuak tidak cinta kampung halaman, ada pepatah Minangkabau mengatakan hujan batu di kampung kita, hujan emas di rantau orang, sasanang hidup dirantau orang elok juo di kampung kita. Artinya biarpun hidup senang di rantau orang senang juga hidup di kampung kita. Ini melambangkan betapa cintanya orang Minangkabau ke kampung halaman, biar pun di kampung menderita.

Warga nagari Sintuak yang hidup diperantau pasti akan pulang ke kampung halaman, biasanya pulang kekampung halaman tersebut pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri adalah merupakan hari kemenangan bagi warga Nagari Sintuak yang mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Biro Pusat Statistik Padang Pariaman fasilitas pendidikan yang ada di nagari Sintuak adalah ;

Tabel. 1
Jumlah sekolah yang ada pada
Nagari Sintuak

Sekolah	Negeri	Swasta
TK	-	3
SD yang sederajat	7	-
SLTP yang sederajat	2	-
SMU yang sederajat	1	-
Jumlah	10	3

A. 1. 6. Mata Pencarian

Dilihat dari topografi nagari maka Nagari Sintuak terdiri dari dataran dengan mamiliki dua buah bukit yang bernama bukit Plambayan dan bukit Gunung Merapi dan memiliki satu sungai yaitu sungai batang Tapakis.

Menurut bapak Wali Nagari Sintuak mata pencarian rakyat nagari Sintuak 80% (delapan puluh persen) adalah bertani yang lainnya adalah wiraswasta dan pedagang. Nagari Sintuak adalah dataran yang tanahnya subur dan irigasi yang teratur. Sehingga hasil dari pertanian tersebut mambuat kehidupan para petani menjadi makmur.

Dari pertanian hasil yang utama adalah padi, karena tanaman pokoknya adalah padi disamping itu juga ada palawija dengan penghasilan berupa sayur-sayuran. Petani biasanya menanamnya secara berselang-seling sekali sawah sekali palawija dengan tujuan supaya kesuburan tanahnya tetap terjaga.

Disamping itu hasil dari perkebunan yang terkenal pada nagari Sintuak adalah kelapa karena hampir setiap rumah tangga minimal memiliki sepuluh batang pohon kelapa. Karena nagari Sintuak adalah Nagari yang luas wilayahnya. Pemasaran kelapa ini sampai ke kota padang bahkan mencangkup seluruh wilayah Sumatera Barat.

Dari pohon kelapa tersebut yang diambil bukan saja buahnya, tetapi juga lidi dari daun kelapa tersebut. Dari lidi pohon kelapa tersebut oleh ibu-ibu warga Nagari Sintuak dibuat sapu lidi yang pemasarannya adalah kota Padang. Karena warga Nagari Sintuak terkenal sangat kreatif jadi tidak ada warga yang menganggur.

Dari dua bukit yang ada di Nagari Sintuak dimanfaatkan juga oleh warga untuk membuat batu bata. Batu bata Nagari Sintuak sangat terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Menurut Wali Nagari Sintuak pemasaran batu bata tersebut mencangkupi seluruh wilayah Sumatera Barat.

Dilihat dari kreatifitas masyarakat nagari Sintuak maka kehidupan warganya dapat digolongkan masyarakat yang makmur dalam perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk rumah yang dibuat oleh masyarakat yang semuanya permanen dan banyak yang memiliki lantai dari keramik serta ukuran rumah yang

dibuat adalah besar- besar juga memiliki perlengkapan rumah yang cukup lengkap.

A. 2. Mamak Pada Masyarakat Nagari Sintuak

Pada masyarakat Nagari Sintuak seorang laki- laki mempunyai dua kedudukan yang pertama adalah sebagai ayah dan yang kedua adalah sebagai mamak. Sebagai ayah ia bertanggung jawab kepada anak dan istri sedangkan sebagai mamak ia bertanggung jawab terhadap kemenakannya.

Dari wawancara penulis dengan 10 (sepuluh) orang masyarakat Nagari Sintuak yang dapat disimpulkan mereka menyatakan bahwa mamak tersebut adalah saudara laki- laki dari ibu dan mempunyai suku yang sama dengan ibu.

Menurut Amir MS, mamak adalah saudara laki- laki ibu. Beliau adalah setingkat, sederajat dan sedarah dengan ibu.⁵² Setingkat, sederajat dan sedarah maksudnya adalah karena mamak tersebut adalah saudara ibu baik itu kakak maupun adik laki- laki dari ibu, karena mamak tersebut mempunyai bapak dan ibu yang sama dengan ibu.

Pada masyarakat hukum adat Minangkabau termasuk juga Nagari Sintuak kehidupan tersebut mempunyai tata krama dan sopan santun tersendiri mulai dari cara bicara maupun tingkah laku terutama sekali terhadap orang yang lebih tua dari pada kita. Bagi orang Minang duduk dan berdiri selalu beradat atau memiliki aturan tersendiri, berbicara beradat, berjalan beradat, makan dan minum beradat,

⁵² Amir MS. Ibid. hal 17.

bertamu beradat bahkan menguap dan batuk pun bagi orang Minang beradat, adat semacam inilah yang disebut sopan santun dalam pergaulan sehari-hari.⁵³

Orang Minangkabau umumnya dan orang Nagari Sintuak khususnya adalah orang yang suka merantau atau mencari reski di negeri orang bahkan sampai keluar negeri. Kehidupan orang Nagari Sintuak di rantau selalu dapat menyesuaikan diri dengan warga dimana mereka menetap karena orang Nagari Sintuak sebelum berangkat ke negeri orang telah dibekali dengan hidup beradat yaitu sopan santun dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bahkan ada pepatah orang Nagari Sintuak menyatakan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, artinya dimana kita tinggal disitulah tempat kita berlindung. Jadi orang Nagari Sintuak harus dapat menyesuaikan diri dengan warga dimana mereka tinggal.

Dalam aturan hidup bermamak berkemenakan juga ada aturannya, mamaklah yang harus didengar dan dihormati dalam lingkungan sukunya, sesuai dengan pepatah adat berikut.⁵³

- Kemenakan barajo ka mamak
- Mamak barajo ka penghulu
- Penghulu barajo ka mufakat
- Mufakat barajo ka nan bana
- Bana badiri sendirinyo

Dalam bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut ;

⁵³ Amir MS. op cit. hal 16.

⁵³ Amir MS. Ibid. hal. 18.

- Kemenakan tunduk ke mamak
- Mamak tunduk kepada penghulu
- Penghulu tunduk kepada mufakat
- Mufakat tunduk kepada kebenaran
- Kebenaran berdiri sendiri

Yang diatur dalam kehidupan beradat atau bersopan santun tersebut bukanlah anak kemenakan saja tetapi juga kehidupan seorang mamak pun juga diatur. Seorang mamak dalam memberikan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak kemenakannya selalu bermusyawarah dengan penghulu untuk mendapatkan kebenaran.

Merantau merupakan kebiasaan orang Minangkabau. Salah satu kewajiban kemenakan sebelum meninggalkan kampung halaman adalah menemui mamak untuk minta izin dan pituah sekaligus membayarkan utang sepanjang adat kok pai tampak punggung, kok pulang tampak muko (kalau pergi tampak punggung, kalau pulang tampak muka).⁵⁴ Ini merupakan tata krama hidup bermamak berkemenakan, bahkan orang Minangkabau mempercayai apabila pergi merantau tidak mendapat restu dari orang tua dan mamak akan medapat celaka hidup di rantau.

⁵⁴ Amir MS. Ibid. hal. 18.

A. 3. Kemenakan Pada Masyarakat Nagari Sintuak

Pada masyarakat hukum adat Minangkabau selalu terdapat dua unsur yaitu mamak dan kemenakan begitu pula dengan masyarakat Nagari Sintuak. Mamak adalah orang tempat maminta nasehat oleh kemenakan disamping ibu dan ayah. Begitu pula kemenakan merupakan penerus generasi bagi seorang mamak yang bakal menggantikan kedudukannya sebagai mamak. Jadi antara mamak dengan kemenakan tidak bisa terlepas dalam kekerabatan masyarakat hukum adat Nagari Sintuak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 10 (sepuluh) orang masyarakat Nagari Sintuak memberikan pengertian kemenakan adalah anak – anak dari saudara perempuan baik itu laki- laki maupun perempuan yang merupakan satu suku dengan mamaknya. Jadi kemenakan disini adalah semua anak dari saudara perempuan. Karena saudara perempuan tersebut adalah merupakan satu keturunan dan merupakan satu suku dengan saudara laki – lakinya. Yang akan melanjutkan keturunan dan memperbanyak jumlah kerabat dalam suku tersebut adalah kemenakan.

Anak- anak dari saudara laki- laki bukan termasuk kemanakan kerana masyarakat hukum adat Nagari Sintuak Manganut sistem materilineal maka suku dari anak saudara laki- laki tersebut adalah suku dari ibunya, maka dari itu anak dari saudara laki- laki tersebut dipanggil anak karena ia berbeda suku dengannya.

Kemenakan dalam kehidupan sehari- hari selalu diawasi oleh mamak karena mamak yang merupakan pengawas dari kemenakan tersebut. Jangan sampai

kemenakan tersebut membuat aib yang akan mempermalukan mamak dimata masyarakat Nagari.

Seorang kemenakan yang mengerti tentang hidup beradat selalu meminta nasehat terhadap segala tindakan yang akan dilakukan. Karena mamak merupakan tempat meminta petunjuk bagi kemenakan tapi sekarang dilihat dilapangan peranan mamak tersebut sudah mengalami pergeseran. Banyak kemenakan meminta nasehat kepada ayah dan ibu karena ayah sekarang sudah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak dan istri.

Tetapi dalam hal- hal tertentu seorang ayah tidak dapat bertindak sendiri atas anaknya misalnya dalam masalah perkawinan. Sekarang terhadap perkawinan seorang anak antara ayah dengan mamak terdapat kerjasama yang baik dalam mencari jodoh buat anak kemenakannya. Meskipun sekarang ada anak kemenakan sendiri yang mencari teman hidup mereka tapi harus mendapatkan persetujuan dari ayah dan mamak.

A. 4. Perkawinan Bajapuk Pada Masyarakat Nagari Sintuak

Apabila dilihat perkawinan dalam masyarakat, maka akan terlihat berbagai bentuk perkawinan, baik menurut adat Minangkabau umumnya dan daerah Nagari Sintuak khususnya. Bagaimanapun bentuk perkawinan itu namun Undang-undang Perkawinan tidak melarang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Sebagimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi

“perkawinan itu adalah syah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya masing- masing”.

Kemudian bagaimana halnya dengan perkawinan Adat “Bajapuik” yang selama ini berlangsung dalam masyarakat Hukum Adat Nagari Sintuak ?.

Dari konsep secara umum yang dimaksud dengan kawin bajapuik ini adalah “menjemput marapulai” (menjemput calon penganten laki- laki) ke rumah orang tuanya oleh pihak penganten perempuan untuk mengadakan pernikahan (akad nikah) di rumah penganten perempuan dengan membawa persyaratan- persyaratan atau ketentuan- ketentuan yang berlaku menurut adat perkawinan di daerah itu.⁵⁵

Pengertian yang sama juga diberikan oleh Syahrial Razak dalam laporan penelitiannya mengenai perkawinan bajapuik ini, yaitu mempelai laki- laki dijemput ke rumahnya dengan upacara kebesaran adat untuk kemudian dibawa ke rumah bakal istrinya.⁵⁶

Laki- laki yang dijemput sebagai sumando itu tidak saja bertujuan melanjutkan keturunan, akan tetapi juga bertanggung jawab atas nafkah kehidupan rumah tangga dan sebagai junjungan yang akan memberikan bimbingan terhadap anak dan istrinya dari kehidupan dunia sampai akhirat.

⁵⁵ Bustanil Arifin, *Uang Hilang dan Masalahnya dalam Perkawinan di Pariaman* (studi kasus, Kenagarian Piubang Kecamatan Sungai Limau) Skripsi, Universitas Andalas Padang, 1984. hal. 35.

⁵⁶ Syahrial Razak, *Masalah Perkawinan Bajapuik dan Uang Hilang Sepanjang Adat di Kabupaten Padang Pariaman*, Laporan Penelitian, Universitas Andalas, Padang, 1989. hal. 1.

Sekalipun dalam perkawinan seorang laki- laki terikat dengan kehidupan rumah tangganya dan dimanapun dia berada, tidaklah terlepas dengan suatu tanggung jawab pada sanak famili dan kaumnya.

Perkawinan semendo seperti di Nagari Sintuak terjadi karena peminangan secara formal dari pihak perempuan kepada pihak laki- laki, untuk mempertegas pernyataan kehendak dari pihak perempuan ini waktu akan melakukan perkawinan telah terjadi keharusan bagi pihak perempuan menjemput pihak laki- laki ke rumah orang tuanya, yang disebut manjapuik.⁵⁷

Apabila dihubungkan dengan sejarah, sesungguhnya di Nagari Sintuak dahulu mempelai laki- laki dijemput dengan kebesaran adat, tidak pakai uang tetapi dengan alat- alat kebesaran seperti saluak, keris, pisau, emas urai yang berbentuk gelang pusaka dan sebagainya. Masing- masing alat itu bermakna dan berkaitan dengan status sosial seseorang dalam masyarakat. Seorang penghulu akan berbeda alat jemputannya dengan seorang raja dan seorang dubalang tidak akan sama pula alat jemputannya dengan orang biasa dan demikian seterusnya. Pada masa itu yang terpenting adalah asal usul dan keturunan serta budi pekerti seseorang.⁵⁸

Pada masa itu jelas uang jemputan tidak menjadi masalah, tetapi sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman, kenyataan ditengah- tengah masyarakat waktu ini sudah berubah, uang jemputan yang diartikan sebagai uang

⁵⁷ Bustanil Arifin, Ibid. hal. 34.

⁵⁸ Syahril Razak, Ibid. hal. 29.

hilang telah mendominasi persyaratan perkawinan adat di Pariaman dan Nagari Sintuak khususnya.

Pengertian uang jemputan secara umum adalah semacam pemberian dari pihak keluarga mempelai wanita kepada mempelai laki-laki. Uang jemputan itu terjadi bila keluarga seorang perempuan (gadis atau janda) ingin menerima seorang pria untuk menjadi menantunya. Kadang-kadang seorang pria dan keluarganya belum mau atau belum bersedia untuk kawin, karena ia belum mempunyai persiapan dan pekerjaan tetap. Oleh karena itu, apabila seorang gadis atau keluarganya ingin mengambilnya untuk suami atau menantunya, maka ia harus menjemputnya, baik berupa uang, emas, kendaraan dan lain sebagainya.

Uang hilang yang dijumpai dalam perkawinan adat Nagari Sintuak ini telah mengalami variasi- variasi, di mana variasi tersebut terhadap uang jemputan adalah.⁵⁹

1. Uang Hilang

Uang hilang adalah suatu pemberian dari pihak keluarga mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki dijemput dengan istilah uang hilang berarti memang uang atau barang itu hilang. Maksudnya tidak ada yang dikembalikan kepada mempelai wanita, tetapi uang itu menjadi hak sepenuhnya dari mempelai laki-laki bersama keluarganya (orang tuanya).

2. Uang Jemputan

⁵⁹ Wawancara penulis dengan ketua KAN. Nagari Sintuak.

Uang jemputan (japutan) adalah uang atau barang pemberian dari pihak penganten wanita kepada pihak penganten pria. Uang jemputan atau barang tersebut dibalas berupa barang- barang emas ataupun berupa pakaian kepada penganten wanita waktu ia datang pertama kalinya ke rumah mertuanya.

3. Uang Dapur

Uang dapur adalah uang yang diberikan oleh pihak penganten wanita kepada pihak penganten laki- laki. Uang ini seluruhnya dipergunakan oleh orang tua penganten laki- laki untuk modal perhelatan atau kenduri perkawinan dari pihak penganten laki- laki. Jumlahnya ditetapkan atas persetujuan kedua orang tua yang bersangkutan.

Permasalahan uang jemputan ini atau yang lebih akrab dengan pratek sebagai uang hilang ini menimbulkan pendapat pro dan kontra. Pendapat yang pro atau setuju menerapkan uang hilang, beranggapan bahwa uang jemputan (uang hilang) adalah suatu tradisi dalam Adat Istiadat yang sudah berlangsung lama dan perlu dilestarikan dalam suatu budaya masyarakat.

Lagi pula mereka yang pro ini menganggap bahwa masalah uang jemputan ini bukan tanggung jawab orang tua saja, tatapi juga tanggung jawab dari mamak- mamaknya. Kalau persiapan tidak cukup, maka adat membolehkan mengadaikan harta pusaka. Sehubungan dengan pepatah adat memang telah mengatakan kebolehan menggadaikan harta pusaka untuk hal- hal yang mendesak keperluannya, seperti : mayat terbujur di tengah rumah, rumah gadang ketirisan, gadih gadang indak balaki dan membangkitkan tareh tarandam.

Sedangkan pendapat yang kontra atau yang menentang penerapan uang hilang ini dilatar belakangi oleh kerana mereka menganggap bahwa tradisi ini kurang sesuai dengan perkembangan jaman dewasa ini.

Karena dengan adanya pemberian sejumlah uang tersebut maka perkawinan didasarkan atas penilaian materi, seolah-olah timbul pandangan negatif yang datang dari luar daerah Nagari Sintuak yang menyebutkan bahwa laki-laki dibeli, sehingga menyebabkan takutnya orang luar Nagari Sintuak untuk mengambil laki-laki Nagari Sintuak jadi manantu atau suami.

Sehubungan dengan tujuan uang jemputan tersebut, bahwa tradisi uang jemputan itu memang sulit memisahkannya dari masyarakat Nagari Sintuak karena tanpa ada uang jemputan, masyarakat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak lengkap, oleh karena itu kiranya tradisi itu masih tetap bertahan dan selalu dikatakan bahwa uang jemputan tidak menjadi masalah, padahal masyarakat sudah pada gelisah mengingat uang jemputan itu sekarang ini juga sudah cenderung menjadi beban dan memberatkan masyarakat, karena tingginya uang jemputan merupakan pretise tersendiri bagi masyarakat. Hal ini tentu saja akan menjadi penghambat dan pembatas antara si kaya dan si miskin, di mana bagi si miskin menyediakan uang yang begitu banyak terasa sangat sulit, sehingga siapa yang diharapkan untuk bakal jadi menantu kalau mereka merasakan dirinya harus dijemput dengan uang jemputan yang tinggi, ada harapan atau keinginan orang yang ekonominya rendah tidak akan pernah tercapai.

Dari segi kerugian yang diderita oleh pihak wanita, dimana pihak wanita harus menyediakan uang yang cuma- cuma di samping uang untuk keperluan utama seperti uang untuk pesta perkawinan, uang adat dan lain- lainnya, sehingga hal ini mungkin saja menghambat terselenggaranya pelaksanaan acara perkawinan, apalagi pihak wanita itu tergolong lemah tingkat ekonominya, tentu saja penyediaan uang hilang itu merupakan pukulan yang hebat terhadap ekonomi keluarga, akibatnya tidak ada kayu jenjang dikeping (tidak ada kayu, tangga pun jadi dibelah) asalkan cita- citanya dapat tercapai.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan terhadap uang hilang ini tidak dapat dihapuskan. Karena mereka cenderung untuk melaksanakan uang hilang tersebut dalam pelaksanaan perkawinan anggota keluarga mereka, dengan alasan bahwa perkawinan yang mereka lakukan adalah perkawinan adat yang telah secara turun- temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka.⁶⁰

Adapun bergesernya pratek jemputan marapulai dari uang jemputan kearah uang hilang ini disebabkan karena tuntutan jaman. Walaupun demikian mereka masyarakat Nagari Sintuak sadar untuk tidak menghilangkan serimoniad adat yang terkandung dalam perkawinan bajapuik tersebut.

Jika kita tinjau uang hilang dari sudut agama Islam maka jelas uang hilang tidak sesuai ajaran Hukum Islam. Di dalam Islam hanya dikenal dengan mahar sebagai kewajiban suami untuk memberikan suatu pemberian kepada istrinya, bukan kepada mertua (pihak keluarga penganten wanita) baik berupa uang

⁶⁰ Wawancara penulis dengan ketua LAN Nagari Sintuak.

maupun barang, seperti yang telah difirman oleh Allah dalam surat An Nisa' ayat 4, yang artinya "Berilah perempuan yang kamu kawini itu suatu pemberian (Mahar)".

Banyaknya mahar tersebut tidak ditentukan, hanya menurut kemampuan suami yang diredhoi istri. Lain halnya dengan uang hilang, pemberian itu datang dari pihak wanita dan besarnya juga ditetapkan dengan tawar menawar, semakin besar uang hilangnya maka semakin bangga pulalah pihak laki-laki. Oleh karena itulah sistem uang hilang bertentangan dengan hukum Islam.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman mengenai "Perubahan peranan mamak dalam perkawinan bajapuik pada masyarakat hukum adat Minangkabau" tersebut diatas dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut ;

B. 1. Perubahan Peranan Mamak Terhadap Kemenakannya Dalam Perkawinan Bajapuik

Dari perkembangan masyarakat yang terjadi di Nagari Sintuak telah terjadi pula perkembangan peranan mamak dalam perkawinan bajapuik dalam hukum adat dewasa ini. Hal tersebut disebabkan antara lain, karena perkembangan pola kehidupan masyarakat Minangkabau yang mempengaruhi bentuk perkawinan pada masyarakat Minangkabau dan membawa pengaruh pula terhadap pola

kehidupan dalam rumah gadang. Perubahan- perubahan tersebut di atas berpengaruh pula terhadap peranan laki- laki sebagai ayah dalam keluarga dan berkurangnya peranannya sebagai mamak terhadap kemenakan- kemenakannya.

Perkembangan yang dilihat di sini adalah terhadap perkawinan, karena perkawinan tidak saja menimbulkan hubungan baru antara marapulai (penganten laki- laki) dan anak daro (penganten perempuan) tetapi juga menimbulkan hubungan baru antara kedua keluarga mereka.

Pelaksanaan perkawinan tersebut mempunyai tahap- tahap tersendiri yang pelaksanaan perkawinan di Nagari Sintuak menurut datuk Amir Rajo Sulaiman Nan Tuo adalah :

1. Tahapan permufakatan perkawinan.

Tahapan permufakatan perkawinan ini lazim juga disebut tahap mencari menantu. Permufakatan perkawinan yang dimaksud adalah permufakatan dalam lingkungan sanak famili, mamak rumah untuk mencarikan jodoh anak kemenakannya. Dalam hal ini yang dicarikan jodoh adalah anak gadis. Apabila dalam suatu keluarga memiliki seorang anak gadis yang telah cukup umur untuk berkeluarga maka sanak famili dan mamak rumahnya mulai melayangkan pandangan kepada laki- laki yang mereka anggap pantas dan cocok untuk anak gadis mereka.

Untuk melaksanakan permufakatan ini diundanglah semua kerabat dan sumando (semenda) dalam kaum, pertemuan ini dipimpin oleh mamak rumah. Dalam pertemuan ini mamak rumah sebagai pemimpin pertemuan tersebut

mengutarakan maksud diadakan pertemuan ini kepada seluruh yang hadir. Setelah tercapai kata sepakat dengan persetujuan dari kaum untuk mencarikan jodoh kemenakan mereka, maka selanjutnya dilanjutkan dengan acara mencari ayam.

Mencari ayam disini maksudnya adalah proses dimana seluruh anggota kaum yang hadir dalam pertemuan tersebut dimintakan usulan tentang calon-calon laki- laki yang ia ketahui seimbang dan pantas untuk jodoh kemenakan mereka.

Kemudian kesemua calon tersebut diseleksi kembali tentang asal usul keturunan, kedudukan martabat gelar dan tingkah laku serta pendidikannya. Dari hasil seleksi ini apabila telah ada satu orang laki- laki yang dianggap pantas dan seimbang untuk dijadikan jodoh anak kemenakan mereka, maka dilakukan pendekatan pada orang tua atau mamak laki- laki tersebut yang dikenal dengan proses “Maanta asok” (mengantar asap) yaitu proses mencari jalan.

Karena perkembangan jaman dan kemajuan pemikiran manusia maka dengan sendirinya terjadi perubahan pada dasar- dasar mencari menantu ini, seperti pemilihan calon suami tidak lagi dari proses permufakatan mencari menantu yang dilakukan oleh sanak famili dan mamak rumah dalam kaum, tetapi ditentukan sendiri oleh anaknya yang disetujui oleh orang tua atau orang tua yang mencarikan sendiri dengan persetujuan anaknya. Kemudian baru dikemukakan kepada sanak famili dan mamak rumah dalam kaum.⁶¹

2. Peminangan

⁶¹ Wawancara penulis dengan Dt. ARS dan Ketua LAN.

Peminangan di Daerah Minangkabau khususnya Nagari Sintuak dilakukan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga pihak laki.

Tahap peminangan ini dilakukan secara tidak resmi karena pada tahap ini kedatangan pihak perempuan ke rumah keluarga pihak laki- laki adalah untuk melakukan peninjauan pihak keluarga laki- laki dalam mengambil anak laki- laki mereka untuk dijadikan urang sumando (orang semenda) dilingkungan keluarga pihak perempuan. Proses inilah yang disebut ma-anta aso (mengantar asap) yaitu proses mencari jalan untuk kesepakatan kedua keluarga dalam mengawinkan anak- anak mereka.

Biasanya proses ma-anta asok (mengantar asap) ini akan memakan waktu agak lama karena dari pihak keluarga laki- laki sendiri juga diadakan permufakatan terlebih dahulu dalam lingkungan sanak famili dan mamak rumah mereka.

Setelah terdapatnya persetujuan kedua belah pihak maka diundanglah kembali pihak keluarga perempuan ke rumah keluarga pihak laki- laki untuk datang secara resmi guna membicarakan segala sesuatunya yang menyangkut tentang pelaksanaan perkawinan. Dari pihak keluarga laki- laki kedatangan secara resmi orang tua, mamak rumah, karib kerabat serta penghulu pihak perempuan ini dinanti juga secara resmi oleh mamak rumah dan penghulu pihak laki- laki.

Setelah adanya kata sepakat kedua belah pihak pembicaraan dilanjutkan pada tingkat pertunangan (tukar cincin).

3. Pertunangan (tukar cincin)

Pertunangan (tukar cincin) adalah suatu tahap kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melakukan suatu janji akan melangsungkan suatu perkawinan pada waktu yang telah ditentukan.

Pada pertemuan ini ditentukan pula adat istiadat yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan waktu terjadi pernikahan, seperti uang jemputan dan tungketan marapulai. Dari kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak atas syarat-syarat yang akan dipenuhi maka sebagai suatu tanda dari persetujuan tersebut maka diadakanlah tuka tando (pertukaran tanda). Setelah terjadi pertukaran tanda ini maka resmilah terjadi pertunangan.

Apabila terjadi pelanggaran kesepakatan perkawinan ini yang disebabkan salah atau kesalahan satu pihak maka dia harus menebus kerugian yang disebut uang kesalahan biasanya bentuk uang kesalahan ini adalah pembayaran yang berupa benda berharga atau sejumlah uang yang telah ditetapkan sebelumnya atau bisa juga berupa dua kali lipat dari uang jemputan.

Pada acara pertunangan (tukar cincin) ini juga dibicarakan tentang hari atau waktu pelaksanaan perkawinan.

4. Tagak Pondok (tegak pondok)

Proses tegak pondok ini adalah acara yang dilaksanakan oleh pihak keluarga perempuan satu minggu sebelum acara perhelatan, yang mana dihadiri oleh sanak keluarga, mamak rumah dan niniak mamak. Pada proses ini dibicarakan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk perhelatan serta membicarakan apa-apa saja

yang dapat diberikan oleh mamak dan kerabat dekat untuk mempersiapkan perhelatan tersebut.

Disamping itu dalam proses ini juga disampaikan tentang kesepakatan yang telah diputus pada waktu acara pertunangan sebelumnya untuk diketahui oleh seluruh kerabat dekat.

5. Proses Nikah

Dari hasil penelitian didapat pelaksanaan pernikahan umumnya dilakukan pada hari Jum'at dan dilaksanakan di Mesjid. Karena masyarakat Nagari Sintuak adalah masyarakat yang melaksanakan perintah agama dengan taat. Menurut mereka pernikahan di Masjid merupakan tempat ibadah dan pernikahan adalah salah satu ibadah.

6. Patang Mangukuih

Patang Mangukuih adalah acara pesta perkawinan yang dilakukan malam hari setelah prosesi pernikahan dilakukan. Acara patang mangukuih dilakukan di rumah mempelai wanita dengan mengadakan keramaian dan hiburan seperti musik (band), rebab, randai dan lain- lain sebagainya.

Pada acara ini diadakan manjapuik marapulai (menjemput penganten pria) dengan segala panjapuiknyo (penjemputnya) yang diiringi oleh para sumandan (wanita yang telah menikah dengan pakaian adat) untuk dipersandingkan di rumah penganten wanita.

Pada malam patang mangukuih ini penganten laki- laki sifatnya dipinjam untuk dibawa ke rumah penganten wanita, setelah acara selesai maka penganten

pria tersebut diantar pulang ke rumah orang tuanya. Selama acara tersebut kedua penganten memakai beberapa pakaian penganten adat sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka untuk diabadikan dengan berfoto.

7. Hari Perhelatan

Hari perhelatan atau pesta perkawinan adalah hari luapan kegembiraan dari kedua mempelai dengan mengadakan baralek gadang atau pesta sehari penuh guna memberitahukan pada khalayak ramai bahwa telah terjadi perkawinan antara dua insan.

Pada hari perhelatan ini mempelai dan keluarga mereka menerima ucapan selamat dari undangan yang datang untuk memeriahkan pesta mereka. Ucapan selamat ini menurut hasil penelitian lebih dominan berbentuk amplop berisikan sejumlah uang.

Untuk mempersandingkan kedua mempelai di rumah mempelai wanita maka mempelai laki-laki dijemput. Proses penjemputan ini dilakukan oleh mamak rumah, kerabat dan urang sumando (orang semenda) dari mempelai pihak wanita dengan syarat-syarat yang telah disepakati, seperti uang jemputan, pakaian adat, sirih pinang selengkapya serta membawakan tungketan bagi orang yang bergelar.

Sekarang yang menjemput marapulai tersebut bukan lagi mamak rumah tetapi urang sumando (orang semenda) dalam suku tersebut. Mamak cukup dilambangkan dengan sirih pinang selengkapnya.⁶²

Setelah syarat- syarat tadi dipenuhi barulah mempelai laki- laki dapat dibawa ke rumah mempelai wanita. Kemudian setelah acara bersanding atau pesta telah usai maka mempelai pria kembali ke rumah orang tuanya.

8. Malam Baretong (malam berhitung)

Malam baretong (malam berhitung) atau lebih dikenal dengan istilah malam badoncek ini dilakukan pada malam hari pesta perkawinan guna mengumpulkan uang. Malam ini berkumpul orang- orang yang diundang, mamak- mamak dan kerabat- kerabat dekat dari keluarga perempuan. Pada kesempatan ini kesemua orang yang hadir berlomba- lomba untuk memberikan dengan menyebutkan sejumlah uang yang sanggup mereka berikan untuk membantu biaya perhelatan.

Semua sumbangan tersebut dicatat satu persatu, sehingga diperoleh perhitungan rugi laba dalam perhelatan atau pesta perkawinan tersebut. Biasanya dari sumbangan yang diperoleh jarang sekali yang rugi akan tetapi banyak yang membawa untung.

Berdasarkan penelitian malam baretong (berhitung) ini lebih mengarah pada formalitas adat saja (ma isi adat sajo) walaupun telah diadakan acara malam berhitung (malam badoncek) tersebut tetap saja akan menambah biaya dari modal keseluruhan biaya perhelatan tersebut. Karena pada malam berhitung (malam

⁶² Wawancara Penulis Dengan Dt ARS.

badoncek) tersebut kerabat atau mamak- mamak mereka tidak lagi mungkin mengeluarkan uang untuk biaya perhelatan dengan jumlah yang besar, karena mereka mempunyai tanggungan atas keluarga mereka sendiri.⁶³

9. Sahari Manjalang (hari manjalang)

Sahari manjalang atau manjalang (mengunjungi) adalah proses yang dilakukan oleh pihak mempelai wanita untuk berkunjung pertama kali setelah pesta perkawinan ke rumah mempelai laki- laki (ke rumah mertua)

Waktu berkunjung ini mempelai wanita diiringi oleh sanak keluarga dan pasumandan ke rumah mempelai laki- laki dengan membawa makanan khas seperti kue- kue, nasi lemak (nasi dari ketan) dan juadah. Adapun kunjungan ini bertujuan agar mempelai wanita berkenalan dengan keluarga penganten laki- laki.

Dalam perkenalan ini pihak mempelai laki- laki memberikan paragiah manjalang (pemberian waktu berkunjung ke rumah mertua) kepada penganten wanita yang berbentuk barang seperti pakaian, cincin emas, gelang emas dan lain- lain sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari pihak mempelai pria.

10. Maduo Jalang (pai maduo)

Manduo jalang adalah berkunjung untuk kedua kalinya ke rumah penganten pria. Biasanya manduo jalang ini dilakukan setelah 3 (tiga) hari mempelai pria tinggal di rumah istrinya.

⁶³ Hasil Penelitian Penulis Terhadap 10 Orang Ibu Rumah Tangga Nagari Sintuak.

Waktu manduo jalang ini penganten wanita beserta penganten pria dengan diiringi kerabat penganten perempuan membawakan kue- kue atau masakan khas untuk diberikan langsung ke rumah- rumah famili- famili penganten pria yang dikunjungi juga menyediakan pemberian sebagai imbalan dari kedatangan pihak penganten wanita untuk berkenalan tersebut.

Dengan selesainya prosesi manduo jalang ini maka dapat dikatakan selesai pula peresmian perkawinan bajapuik antara kedua mempelai.

Seperti diketahui bahwa masyarakat Minangkabau umumnya dan masyarakat Nagari Sintuak khususnya berlaku sistem kekerabatan Matrilineal yang didasarkan pada garis keturunan ibu. Hal ini berarti bahwa anak laki- laki dan perempuan termasuk keluarga ibunya dan tidak ayahnya. Ayah atau suami adalah urang sumando atau tamu terhormat dalam lingkungan keluarga istrinya.

Dilain pihak perkawinan bagi seorang perjaka Minang berarti pula langkah awal bagi dirinya meninggalkan kampung halaman, ibu dan bapak serta seluruh kerabatnya untuk memulai hidup baru dilingkungan kerabat istrinya. Prosesi turun janjang (turun tangga) dari rumah tangga orang tuanya, bagi seorang perjaka Minang adalah suatu peristiwa yang sangat mengharukan. Rasa sedih dan gembira bergalau menjadi satu. Upacara turun janjang (turun tangga) ini dilakukan dalam rangka upacara japuik manjapuik (jemput menjemput) yang berlaku dalam perkawinan adat Nagari Sintuak.

Dalam hal menjemput atau mendatangkan pihak laki- laki ke rumah perempuan, haruslah dilakukan suatu proses pengambilan oleh pihak perempuan.

Pengambilan pihak laki- laki oleh pihak perempuan ini sesuai dengan pepatah datang bajapuik, pai baanta (datang dijemput, pergi diantar). Pepatah ini mempunyai makna bahwa pihak marapulai (penganten laki- laki) tidak akan datang ke rumah istrinya (anak daro) apabila tidak datang pihak keluarga anak daro tersebut untuk menjemput.

Dari penelitian didapat bahwa pemakaian uang jemputan adalah hal yang wajar dalam praktek perkawinan adat di daerah Nagari Sintuak. Uang jemputan dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada mempelai laki- laki dan keluarganya dengan keluarnya anak laki- laki mereka dari rumah gadang (rumah besar) mereka untuk membina rumah tangga sendiri dengan istrinya dilingkungan keluarga istrinya tersebut. Ada anggapan yang muncul bahwa “diagiah kandak urang, balaku pulolah kandak awak” (diberi permintaan orang, berlaku pulalah permintaan kita) maksudnya dalam hal uang jemputan ini adalah sudah semestinya pihak keluarga mempelai laki- laki untuk memberikan persyaratan uang jemputan untuk menjemput anak laki- laki mereka yang akan pergi meninggalkan kehidupannya di lingkungan sanak keluarga untuk memulai kehidupan baru dilingkungan keluarga istrinya.

Dari penelitian yang dilakukan didapat bahwa apabila pada sebuah keluarga mempunyai anak gadis, maka dari awal mereka sebagai orang tua telah mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan perkawinan anak gadis mereka nantinya, termasuk telah mempersiapkan uang jemputan tersebut.

Ketika ditanya kepada mamak rumah pada dua suku yaitu suku koto dan suku sikumbang tentang tanggung jawab mamak dalam hal uang jemputan ini maka diperoleh data seperti tabel berikut ini.

Tabel 2

Tanggung jawab mamak rumah suku koto

Dalam uang jemputan.

Tanggapan	Frekwensi	%
Mamak bertanggung jawab	1	20%
Mamak tidak bertanggung jawab	4	80%
Jumlah	5	100%

Tabel 3.

Tanggung jawab mamak rumah suku sikumbang

Dalam uang jemputan

Tanggapan	Frekwensi	%
Mamak bertanggung jawab	0	-
Mamak tidak bertanggung jawab	5	100%
Jumlah	5	100%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita lihat perubahan peranan mamak dalam perkawinan bajapuik khususnya dalam memberikan uang jemputan terhadap kemenakannya yang menyatakan mamak tidak lagi bertanggung jawab. Hal ini terpengaruh pada perubahan fungsi seorang bapak dalam keluarga. Seorang bapak dulunya tidaklah bertanggung jawab pada anak dan istrinya melainkan bapak adalah mamak dalam keluarga orang tuanya, maka bapak tadi yang merupakan mamak bertanggung jawab pada kemenakannya. Lain halnya sekarang, bapak bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya (anak dan istrinya) sedangkan mamak dari anak tadi bertanggung jawab pula terhadap keluarganya sendiri.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap 10 (sepuluh) orang mamak rumah tersebut, perubahan perkembangan mamak tersebut berkisar tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh). Perubahan perkembangan tersebut disebabkan faktor ekonomi yang merupakan faktor yang paling dominan.⁶⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan 10 (sepuluh) orang mamak rumah tersebut dapat ditarik suatu gambaran bahwa sulit untuk menghilangkan sistem perkawinan bajapuik ini di dalam hukum adat pada Nagari Sintuak. Walaupun dengan kemajuan jaman, kawin bajapuik merupakan sesuatu hal yang nyata dan kebanggaan orang nagari Sintuak atas keberadaan adat kebiasaan tersebut, seperti istilah Minangnya “adat bapaneh, syarak balinduang” (adat berpanasan, syarak

⁶⁴ Wawancara Penulis Dengan Wali Nagari Sintuak.

(ketentuan agama) berlindung) begitulah tradisi kawin bajapuik ini yang merupakan adat yang aktual dan ayata.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan peranan mamak yang masih menonjol sekarang dalam hal sebagai berikut ;

1. Memberikan izin perkawinan kemenakannya yang berupa tanda tangannya yang dicantumkan dalam surat nikah.
2. Memberi gelar kepada kemenakan yang sudah menikah, dengan mengambil gelar dari mamak- mamaknya yang sudah meninggal dunia.
3. Memelihara dan mengurus harta pusaka kalau belum dibagi- bagikan kepada kemenakan. Apabila sudah dibagi- bagikan kepada kemenakan- kemenakan, maka akan memberi atau tidak memberikan izin untuk digadaikan.
4. Mamak menentukan tempat pemakaman kemenakan yang meninggal dunia, yang telah disetujui oleh istri dan anak- anak yang ditinggalkan, yaitu ditempat pemakaman keluarga.
5. Mamak- mamak yang duduk dalam Lembaga Adat Nagari, membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kemenakan- kemenakannya.

Berdasarkan uraian dari hasil pengamatan penulis di lapangan mengenai pokok permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa telah terjadi perubahan peranan mamak dalam kenyataannya dewasa ini. Dewasa ini peranan laki- laki Minangkabau pada umumnya dan Nagari Sintuak pada khususnya sebagai ayah yang sangat menonjol dalam memenuhi kebutuhan lahir bathin istri dan anak- anaknya.

B. 2. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Peranan Mamak

Sebagaimana yang telah di uraikan di atas bahwa perkembangan peranan mamak telah mengalami pergeseran yang mana sekarang ini mamak paranannya telah berkurang terhadap kemenakan- kemenakannya. Yang menonjol sekarang ini adalah peranan ayah terhadap istri dan anak- anaknya. Perubahan perkembangan peranan mamak tersebut dipengaruhi oleh faktor- faktor sebagai berikut ;

B. 2. 1. Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi perkembangan peranan mamak tersebut terhadap kemenakan- kemenakannya. Karena harato pusako (harta pusaka) jumlahnya tetap sedangkan jumlah kemenakan terus berkembang sehingga hasil dari harta pusaka tersebut tidak dapat lagi membantu kebutuhan kemenakannya.

Disamping itu harta pusaka yang ada tersebut telah banyak dibagi- bagi kepada kemenakan- kemenakannya. Pembagian ini dengan maksud supaya tidak terjadi keributan diantara kemenakan- kemenakan mereka.⁶⁵

Pembagian tersebut juga dimaksudkan agar anak kemenakan tersebut dapat mengolah harta pusaka tersebut secara rutin. Beda dengan harta pusaka yang tidak dibagi- bagikan kepada kemenakan, maka hak pengelolaan harta pusaka tersebut bergiliran diantara anak kemenakan yang ada.

⁶⁵ Wawancara Penulis Dengan LAN Nagari Sintuak

Disamping itu juga mamak di Nagari Sintuak sekarang telah sibuk mengurus istri dan anak- anak mereka sendiri. Karena mereka juga sebagai ayah dari anak- anak mereka. Sehingga perhatian mamak tersebut lebih banyak kepada anak dan istri mereka sendiri.

B. 2. 2 Budaya Merantau Orang Minang

Orang Minangkabau adalah orang yang suka merantau, budaya merantau ini telah merubah pola berfikir orang Minangkabau itu sendiri khususnya orang Nagari Sintuak

Perubahan pola tersebut dalam kehidupan perkawinan di rantau ialah dalam cara memilih pasangan hidup. Dahulu, perkawinan yang paling ideal adalah mengawini anak perempuan dari mamak sendiri yang disebut dengan istilah pulang ke mamak dan perkawinan pulang ke bako yaitu perkawinan yang dilakukan antara anak laki- laki dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya.

Perubahan pola kehidupan perkawinan mengakibatkan berkurangnya laki- laki Nagari Sintuak di rantau yang mengawini anak mamak atau perempuan yang sekampung dengan mereka. Dalam kenyataannya banyak di antara mereka yang mengawini perempuan- perempuan yang bukan berasal dari Nagari Sintuak sama sekali. Demikian pula sebaliknya, makin banyak perempuan Nagari Sintuak yang kawin dengan laki- laki yang bukan Nagari Sintuak, misalnya laki- laki atau perempuan Jawa, Sunda, Batak , Aceh, Palembang dan sebagainya.

Namun perubahan pola kehidupan perkawinan dengan laki- laki atau perempuan yang tidak seagama, masih sangat jarang terjadi di antara orang Nagari Sintuak di rantau. Apabila hal ini sampai terjadi, biasanya calon istri atau suami tersebut sedapat mungkin harus lebih dahulu masuk agama Islam.

Perkembangan pola kehidupan perkawinan masyarakat Nagari Sintuak di Rantau, mengakibatkan pola perkawinan tradisi pulang ke bako menjauh di antara orang- orang Nagari Sintuak di rantau, maka makin terbukanya mereka terhadap pengaruh luar dan makin melonggarnya ikatan adat itu sendiri terhadap mereka. Hal ini lebih terasa terutama dikalangan generasi muda yang pengenalannya terhadap adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Nagari Sintuak mungkin hanya samar- samar saja.

Perubahan pola kehidupan perkawinan yang terjadi di rantau, akan mempengaruhi pula pola kehidupan perkawinan di Nagari Sintuak itu sendiri, walaupun perubahan itu terjadi secara perlahan- lahan mengikuti perkembangan zaman.

Bagi laki- laki Nagari Sintuak yang pergi merantau untuk menuntut ilmu bertahun- tahun di kota atau di luar Nagari Sintuak, akan kembali ke kampung halamannya dengan membawa segala perubahan- perubahan, termasuk dalam hal yang menyangkut masalah perkawinan, terutama dalam menentukan pasangannya.

Secara sosiologis perpindahan atau perantauan atau migration itu merupakan faktor yang kuat dalam menimbulkan perubahan sosial atau pergeseran sosial. Perubahan sosial atau pergeseran sosial tersebut terjadi secara perlahan- lahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan adanya perubahan bentuk perkawinan dan sistem perkawinan yang berlaku pada masyarakat Nagari Sintuak di rantau maupun yang terjadi secara perlahan- lahan di Nagari Sintuak itu sendiri, akan mengakibatkan terjadinya perubahan peranan laki- laki sebagai suami atau ayah terhadap istri dan anak- anaknya.⁵⁶

Dalam bentuk perkawinan semendo bertandang, peranan suami atau ayah hanya sebagai tamu atau urang sumando saja, mulai terjadi perkembangan pada bentuk perkawinan semendo menetap sampai pada bentuk perkawinan semendo bebas, yaitu laki- laki Nagari Sintuak sebagai suami dan kepala rumah tangga yang memegang kekuasaan orang tua terhadap anak- anaknya, tanpa campur tangan dari pihak keluarga istrinya maupun campur tangan mamak dari anak- anak tersebut.

B. 2. 3. Pendidikan

Faktor yang merupakan kenyataan dewasa ini yang mempengaruhi perkembangan peranan mamak adalah faktor pendidikan. Kemajuan pendidikan telah tampak pula pengaruhnya terbukti dengan banyaknya sekolah- sekolah dasar

⁵⁶ Wawancara Penulis Dengan Wali Nagari Sintuak

yang ada di nagari Sintuak, sekolah tersebut berkembang kejejang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi yang banyak di Kota Padang.

Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula sifat individualismenya. Individualisme di dalam hidup yang sekarang tengah bergerak di dalam masyarakat Nagari Sintuak, di dalam arti menjalani perkembangan susunan keluarga baru. Yang bagi orang Nagari Sintuak yang lebih dahulu maju hal ini bukan persoalan baru lagi, akan tetapi sebagian besar orang Nagari Sintuak lainnya perkembangan ini masih membawa persoalan.

Sifat individualisme ini terlihat dalam kehidupan masyarakat, dimana mamak tidak dijadikan lagi sebagai tempat meminta nasehat oleh kemenakan-kemenakannya, karena mereka beranggapan bahwa ia lebih mengetahui persoalan hidup dari mamaknya. Sekarang ini kemenakan tersebut lebih dekat hubungannya dengan ayahnya ketimbang kepada mamaknya. Bagi kemenakan-kemenakan yang tinggal di rantau bersama orang tuanya tidak tahu lagi siapa mamaknya. Bahkan ketentuan hidup beradat tidak dimengerti lagi oleh kemenakan tersebut.⁶⁷

Disamping itu pengaruh pendidikan tersebut juga mempengaruhi rasa solidaritas masyarakat Minangkabau umumnya dan masyarakat Nagari Sintuak khususnya. Pendidikan tersebut membawa orang melihat kenyataan hidup yang jauh ke depan berdasarkan ilmu yang mereka peroleh. Sehingga kehidupan mereka juga mempengaruhi sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat.

⁶⁷ Wawancara Penulis Dengan Ketua LAN Nagari Sintuak

Bagi orang- orang yang di kampung- kampung atau di nagari- nagari sendiri telah timbul keinsyafan bahwa mereka tidak mungkin terus menerus bertahan dengan susunan lama menghadapi perkembangan dan kebutuhan zaman yang jauh meningkat.

Pendidikan juga akan merubah tingkat perekonomian orang. Bagi yang berpendidikan mereka mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendidikan yang mereka peroleh bukan lagi dari hasil harta pusaka yang diwarisi oleh nenek moyang mereka.

Bahkan ada warga Nagari Sintuak yang hidup di perantauan tidak mau peduli lagi terhadap harta pusaka mereka yang ada di kampung halaman. Mereka beranggapan biarlah harta tersebut dinikmati oleh kerabatnya yang ada di kampung.⁶⁸

Pengaruh kehidupan perekonomian telah membuat suasana menjadi renggang masing- masing mereka telah berusaha sendiri- sendiri bukan lagi buat kemenakan- kemenakannya tetapi sekarang buat anak- anak dan istri mereka.

⁶⁸ Wawancara Penulis Dengan Warga Nagari Sintuak Yang Tinggal di Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada perumusan masalah di depan, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. Dari hasil pengamatan langsung ke daerah Nagari Sintuak terhadap 10 (sepuluh) orang mamak rumah, ternyata telah terjadi perubahan peranan mamak terhadap kemenakannya dalam perkawinan bajapuiik. Perkembangan tersebut telah terjadi sejak tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh). Sekarang yang banyak mempunyai peranan adalah ayah karena ayahlah yang bertanggung jawab penuh terhadap segala kebutuhan anaknya. Yang memberikan uang jemputan bukan lagi mamak karena harta pusaka yang akan diberikan tersebut sudah tidak ada lagi dan telah dibagi- bagikan kepada kemenakannya. Perkembangan pola kehidupan masyarakat Nagari Sintuak tersebut juga mempengaruhi perubahan anak mudanya, dimana anak muda sekarang tidak mau lagi di carikan jodoh buat teman hidup oleh mamak atau ayahnya. Tetapi mereka sendiri yang mencari pasangan hidup mereka masing-masing mamak dan orang tua tinggal menyetujui.

2. Disamping faktor ekonomi yang mempengaruhi perkembangan peranan mamak juga dipengaruhi oleh faktor budaya merantau. Dengan banyaknya masyarakat Nagari Sintuak merantau maka mereka telah membentuk keluarga sendiri terlepas dari peran serta mamaknya. Kehidupan merantau tersebut juga mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat Nagari Sintuak, pendidikan tersebut membuat masyarakat Nagari Sintuak menjadi bersifat individualisme dan rasa solidaritasnya menjadi berkurang, mereka lebih melihat kenyataan hidup yang ada sekarang.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa peranan mamak sekarang hanya dalam hal sebagai berikut :

1. Memberikan izin perkawinan kepada kemenakannya yang akan menikah, berupa tandatangan yang dicantumkan dalam surat nikah.
2. Memberi gelar kepada kemenakan laki- laki yang sudah menikah dengan gelar dari mamak- mamaknya yang sudah meninggal dunia.
3. Memelihara dan mengurus harta pusaka dan membagi- bagikan hak pakainya (ganggam bauntuak) kepada kemenakan- kemenakannya. Apabila harta pusaka itu akan digadaikan atau dijual maka harus seizin mamaknya.
4. Mamak menentukan tempat pemakaman di tempat pemakaman keluarga bagi kemenakannya yang meninggal dunia, apabila sudah mendapat persetujuan dari keluarga yang ditinggalkannya.

5. Mamak- mamak yang duduk dalam LAN (lembaga adat nagari) membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kemenakan- kemenakannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa dalam kenyataannya dewasa ini telah terjadi perubahan peranan mamak dalam masyarakat hukum adat khususnya dalam bidang perkawinan bajapuik. Yang semula mamak bertanggung jawab terhadap kemenakannya tapi sekarang beralih tanggung jawab terhadap kehidupan anak dan istrinya.

B. Saran- saran

Dengan adanya kenyataan bahwa telah terjadi perkembangan peranan mamak dalam perkawinan bajapuik dalam masyarakat hukum adat Nagari Sintuak khususnya, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka melestarikan hukum adat Minangkabau diadakan seminar- seminar atau penataran- penataran, agar generasi muda dan mamak- mamak masyarakat Minangkabau tidak melupakan seluk beluk adat Minangkabau sendiri. Kegiatan ini hendaknya diadakan juga di seluruh daerah Sumatera Barat dan di Jakarta, misalnya dalam pertemuan rutin Ikatan Mahasiswa Sumatera Barat di Jakarta atau di Taman Mini Indonesia Indah anjungan Sumatera Barat.

2. Dalam rangka pembentukan hukum nasional, hendaknya diperhatikan pula kesadaran hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang dapat menunjang pembentukan hukum nasional.
3. Perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Minangkabau, untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan itu dapat menunjang pembentukan hukum nasional di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Abdulsyani, 1994, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Alimandan, 1992, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Chidir, 1979, Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurispudensi Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anwar, Chairul, 1997 , Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arifin, Bustanil, 1984, Uang Hilang dan masalahnya Dalam dalam Perkawinan Di Pariaman (Studi Kasus, Kenagarian Piubang Kecamatan Sungai Limau), Skripsi, Universitas Andalas, Padang.
- BA, Jamaris, 181, Kertas Kerja, Uang Hilang Ditinjau dari Segi Budaya Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan di Daerah TK.II Padang Pariaman.
- Bakry, Nazar, 1984, Uang Jemputan dan Variasinya Dalam Adat Perkawinan di Pariaman serta Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat, Laporan Penelitian, Institut Agama Islam (IAIN) Al Jamiah Imam Bonjol, Padang.
- Bzn, A. Teer Har, 1999, DiIndonesiakan oleh K. Ng. Soebakti Posponoto, Asas – asas dan Susunan Hukum adat, Cetakan ke-12, PT. Pradyna Paramita, Jakarta.
- Chatib, Lukman, 1980, Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan dan Masalahnya Pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Kertas Kerja Pada Seminar Internasional Mengenai Kasusasteraan, Kemasyarakatan dan Budaya Minangkabau di Bukittinggi 4- 6 September 1980.

Daud, Ali Muhamad, 1998, Hukum Islam , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tat Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.

Hazairin, 1970, Demokrasi Pancasila ,Jakarta,Bina Aksara

Harahap, M. Yahya, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, Cv. Zahir Treadiang co Medan, Medan.

Hakim, Idrus Dt. Rajo Penghulu, 1978, Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau, Penerbit CV. Rosda, Bandung.

----- 1986, Pokok- Pengetahuan Adat Alam Minagkabau, CV. Ramaja Karya, Bandung.

----- 1984, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minagkabau, Remaja Karya, Bandung.

Hadikusuma, Hilman, 1993, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ibrahim, Ahamad, 1984, Persepsi Minangkabau Minangrantau, Madju, Jakarta.

Jabbar, Hamid, 2000, Gebu Minang dari Tradisi ke Inovasi, Lembaga dan Yayasan Gebu Minang, Jakarta.

Junus, Umar, 1984, Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau, Suatu Problema Sosial Sastra, Balai Pustaka, Jakarta.

Kadir, Usman Abdul, 1980, Sistem Kemasyarakatan Minangkabau Bergeser Dari Comunal ke Individual, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 2000, Pengetahuan Adat Minangkabau.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 2002, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Banagari.

Maggis, M Rasjid Dt Radjo Panghulu, 1982, Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya, Mutiara, Jakarta.

Mansoer, M.D, 1970, Sejarah Minangkabau, Bharatara, Jakarta.

Muhamma, Bushar, 1986, Asas- Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta.

----- 1985, Pokok- Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

----- 1985, Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia, Padnya Paramita, Jakarta.

Muhdlor, A. Zuhdi, 1994, Memahami Hukum Perkawinan, Al Bayan, Bandung

Muhammad, Bushar, 1986 ,Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar ,Jakarta ,Prdnya Paramita.

M. S., Amir, 1999, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

----- 2001, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau, PT. Mutiara Sumber Widdy, Jakarta.

----- 1987, Tongak Tuo Budayo Minang, CV. Karya Indah, Jakarta.

Navis, A. A, 1984, Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Cetakan ke-1, PT. Tempirint, Jakarta.

----- 1999, Yang Berjalan Sepanjang Jalan, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Naim, Muchtar, 1984, Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Nasroen, M. 1971, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Jakarta.
- Nazir, Mohammad, 1983, Metoda Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rangkoto, N.M., Dt Bandaro, 1984, Hubungan Mamak Dengan Kemenakannya Dahulu Dan Sekarang Serta Persembahan, Adat Bukittinggi Lestari.
- Razak, Syahrial, 1989, Masalah Kawin Bajapuik dan Uang Hilang Sepanjang Adat di Kabupaten Padang Pariaman, Laporan Penelitian, Universitas Andalas, Padang.
- Ramulyo, Mohammad Idris, 1996, Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang- undang Nomor 1 tahu 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rofig, Ahmad, 1995, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Radjab, Muhammad, 1969, Sistem Kekerabatan di Minangkabau, Padang Indonesia Center for Minangkabau Studies Press.
- Sihombing, Herman, 1987, Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat, Alumni, Jakarta.
- Soemadinigrat, Otje Salaman, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni Bandung.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1988, Metoda Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1994, Kewarisan pada Masyarakat Matrilineal, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Soekanto, Soejono, 1986, Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta.

----- 1986, Intisari Hukum Perikatan Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta.

----- 1979, Masalah Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat, Academica, Jakarta.

----- dkk, 1978, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Soepomo, 1970, Bab- Bab Tentang Hukum Adat, Grafitti Press, Jakarta.

Sudaryatmi, Sri, 2000, Tesis, Penentuan Hak dan Pemanfaatan Tanah Timbul Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai, Studi Kasus di Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

Sugangga, I.G.N., 1995, Hukum Waris Adat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

----- 1995, Hukum Waris Adat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudiyat, Iman, 1978, Asas- Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Syarifuddin, Amir, 1984, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta.

Thalib, Sjofoyan, 1985, Sistem Matrilineal Masyarakat Minangkabau Perkembangan Terakhir, Laporan Penelitian, Universitas Andalas Pusat Penelitian, Padang.

----- 1996, Hukum Adat Perkawinan Minangkabau Setelah Berlakunya Hukum Perkawinan Nasional, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Thaib, Darwis Dt. Siti Bandaro, 1965, Seluk Beluk Adat Minangkabau, NV. Nusantara, Bukittinggi.

B. Peraturan Perundang- Undangan.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang- Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Tentang Pedoman Mengenai Pengaturan Desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2002, Tentang Pemerintahan Nagari.